

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022



KECAMATAN RANCASARI

KOTA BANDUNG

2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas penyusunan Laporan Tahunan Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022 disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022 ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Rancasari Kota Bandung selama Tahun 2022. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Kecamatan Rancasari Kota Bandung untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan memenuhi harapan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam kinerja tahun yang akan datang.

Bandung, 18 Januari 2023

CAMAT RANCASARI



Drs. H. HAMDANI, M.M
NIP. 19670808 198910 1 001



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan Rancasari	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	11
1.4 Isu Strategis	13
1.4.1 Visi Misi.....	17
1.4.2 Kaitannya Dengan Upaya Pencapaian SPM	18
1.4.3 Kaitannya Dengan Upaya pencapaian SDGs.....	19
1.4.4 Kaitannya Dengan Pencapaian IPM.....	20
1.5. Landasan Hukum	22
1.6. Sistematika	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1. Rencana Strategis	24
2.2. Tujuan dan Sasaran	30
2.3. Indikator Kinerja Utama.....	31
2.4. Perjanjian Kinerja 2022.....	34
2.5. Perencanaan Anggaran Tahun 2022	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	41
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	41
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	43
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	45
BAB IV PENUTUP	73

**DAFTAR TABEL**

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Agama.....	5
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Mata pencaharian.....	5
Tabel 1.4 Daftar Nama Pegawai Di Lingkungan Kecamatan Rancasari ..	9
Tabel 1.5 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	10
Tabel 1.6 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan.....	10
Tabel 1.7 IPM Kota Bandung Tahun 2011-2017	21
Tabel 2.1 Keselerasan Tujuan Misi Pada RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan Misi Pada Renstra Perubahan Kecamatan Rancasari Tahun 2018-2023	26
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	27
Tabel 2.3 Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kecamatan Rancasari Tahun 2018-2023	30
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Renstra	31
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Rancasari Tahun 2022	34
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Triwulanan Kecamatan Rancasari Tahun 2022	35
Tabel 2.7 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Rancasari Kota Bandung	36
Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022.....	37
Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022	39
Tabel 2.10 Anggaran Kecamatan Rancasari Tahun 2022	40
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022	44
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022	45
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 4	45
Tabel 3.4 Pencapaian Target Misi	46
Tabel 3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	46



Tabel 3.6	Analisis Pencapaian sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	47
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	51
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2022 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari.....	55
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	61



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dibuat adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kecamatan Rancasari dan pemberi amanah (Wali Kota Bandung) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Rancasari selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Rancasari Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Rancasari

Kecamatan Rancasari merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung.



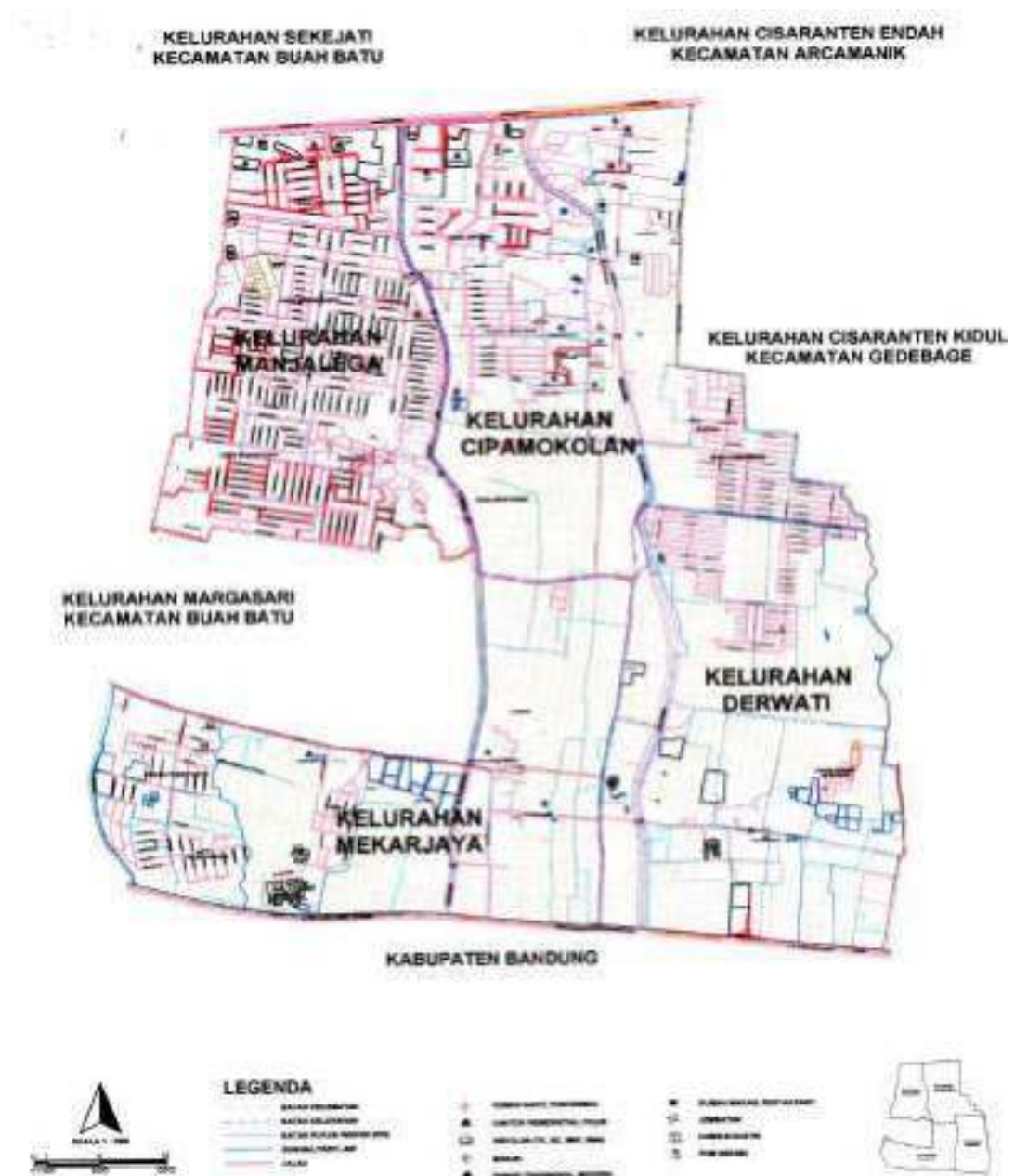
1. Terbentuknya Kecamatan Rancasari

Kecamatan Rancasari memiliki luas lahan 755,525 (Tujuh ratus lima puluh lima koma lima ratus dua puluh lima) Ha.

Secara administratif Kecamatan Rancasari dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
- Bagian Utara : Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Buah Batu Kota Bandung
- Bagian Timur : Kecamatan Gedebage Kota Bandung
- Bagian Barat : Kecamatan Buah Batu Kota Bandung

PETA WILAYAH KECAMATAN RANCASARI





2. Penduduk

Kecamatan Rancasari memiliki jumlah penduduk sebanyak 74344 jiwa, yang terdiri dari 36360 jiwa laki-laki dan 37984 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Rancasari saat ini mencapai sekitar 25039 KK. Berdasarkan data kependudukan dari Kecamatan Rancasari pada akhir bulan Desember tahun 2022 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 98,40 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu karena banyaknya kompleks-komplek perumahan.

a. Usia

Jumlah penduduk berdasarkan struktur umur :

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

NO	UMUR	WARGA NEGARA INDONESIA			WARGA NEGARA ASING			JUMLAH		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	0 - 4	3.781	3.898	7.679	-	-	-	3.781	3.898	7.679
2	5 - 9	3.382	2.547	5.929	-	-	-	3.382	2.547	5.929
3	10 - 14	2.963	2.877	5.840	-	-	-	2.963	2.877	5.840
4	15 - 19	2.946	3.612	6.558	-	-	-	2.946	3.612	6.558
5	20 - 24	2.983	3.042	6.025	-	-	-	2.983	3.042	6.025
6	25 - 29	3.094	3.274	6.368	-	-	-	3.094	3.274	6.368
7	30 - 34	3.168	3.319	6.487	-	-	-	3.168	3.319	6.487
8	35 - 39	3.101	3.292	6.393	-	-	-	3.101	3.292	6.393
9	40 - 44	2.809	3.042	5.851	-	1	1	2.809	3.043	5.852
10	45 - 49	2.541	2.770	5.311	-	-	-	2.541	2.770	5.311
11	50 - 54	1.928	2.012	3.940	1	-	1	1.929	2.012	3.941
12	55 - 59	1.460	1.714	3.174	1	-	1	1.461	1.714	3.175
13	60 - 64	900	987	1.887	-	-	-	900	987	1.887
14	65 Keatas	1.302	1.597	2.899	-	-	-	1.302	1.597	2.899
JUMLAH		36.358	37.983	74.341	2	1	3	36.360	37.984	74.344



b. Agama

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan menurut Golongan Agama

NO	KELURAHAN	JUMLAH MENURUT GOLONGAN AGAMA					
		ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	HINDU	BUDHA	LAINNYA
1	Cipamokolan	20761	552	89	33	20	0
2	Derwati	17548	1665	494	119	0	0
3	Manjahlega	16941	368	232	61	21	0
4	Mekarjaya	15125	214	86	4	11	0
JUMLAH		70375	2799	901	217	52	0

c. Pendidikan dan Mata Pencaharian

Tabel 1.3.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Mata Pencaharian

NO	UMUR	WARGA NEGARA INDONESIA			WARGA NEGARA ASING			JUMLAH			KET
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	
A	PENDIDIKAN										
1	Tidak/Belum Sekolah	4008	4401	8409	0	0	0	4008	4401	8409	
2	Tidak Tamat SD	1590	2298	3888	0	0	0	1590	2298	3888	
3	Belum Tamat SD	4206	4433	8639	0	0	0	4206	4433	8639	
4	Tamat SD	3007	3832	6839	0	0	0	3007	3832	6839	
5	SLTP	5233	5641	10874	0	0	0	5233	5641	10874	
6	SLTA	8187	8472	16659	0	1	1	8187	8473	16660	
7	Akademi/Sedera jat	5693	4642	10335	0	0	0	5693	4642	10335	
8	Universitas	4434	4264	8698	2	0	2	4436	4264	8700	
JUMLAH		36358	37983	74341	2	1	3	36360	37984	74344	
B	MATA PENCAHARIAN										
1	Pegawai Negeri	2102	1589	3691	0	0	0	2102	1589	3691	
2	TNI/POLRI	864	515	1379	0	0	0	864	515	1379	
3	Pegawai Swasta	6106	5449	11555	0	0	0	6106	5449	11555	



Dan dengan pembagian penggunaan areal tanahnya sebagai berikut :

PENGUNAAN AREAL TANAH

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	344,361 Ha
2.	Tanah Kering (Daratan)	352,243 Ha
3.	Tanah Basah	1,274Ha
4.	Tanah Hutan	0 Ha
5.	Tanah Perkebunan	31,218 Ha
6.	Tanah Keperluan Fasilitas Umum	17,325 Ha
7.	Tanah Keperluan Fasilitas Sosial	9,104 Ha
8.	Lain-lain	
	Jumlah	755,525 Ha

3. Kondisi Geografis

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Rancasari Kota Bandung dapat dilihat dalam dibawah ini.

KAWASAN PERENCANAAN DALAM LINGKUP KECAMATAN RANCASARI

Kecamatan	Kelurahan
RANCASARI	1. Kelurahan Cipamokolan 2. Kelurahan Derwati 3. Kelurahan Manjahlega 4. Kelurahan Mekarjaya

Secara geografis Kecamatan Rancasari memiliki bentuk wilayah datar / sebesar 100 % dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Rancasari berada pada ketinggian 640 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Rancasari berkisar 23⁰C - 30⁰C

4. Administrasi Pemerintahan

a. Instansi Pemerintah di Wilayah Kecamatan Rancasari Intansi Pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan Rancasari, terdiri dari :

- 1) Instansi Vertikal berjumlah 4 unit, terdiri dari :
 - a. Polsekta Rancasari
 - b. KUA Kecamatan Rancasari
 - c. BBWS Citarum



- d. Koramil Rancasari, Buahbatu dan Gedebage
- 2) Instansi BUMN/BUMD berjumlah 7 unit
- a. Kantor Pos
 - b. Dolog Divisi Regional III
 - c. Bank Jabar
 - d. Bank Mandiri
 - e. Bank BNI
 - f. Bank BRI
 - g. Bank BTN

DATA KONDISI KANTOR KECAMATAN RANCASARI

No	Uraian	Data	Keterangan
1.	Status Kepemilikan	Pemerintah Kota Bandung	
2.	Luas Tanah	2.080 m ²	
3.	Luas Bangunan	695 m ² (Ktr) + 122m ² (aula)	
4.	Tahun Pendirian	1989	Direnovasi tahun 2013 - 2014
5.	Sumber Biaya	APBD Kota Bandung	
6.	Biaya dari Pusat /Prop	Rp. 0	
7.	Biaya APBD II	Rp.2.043.880.445.-	
8.	Biaya lainnya	Rp. 0	
9.	Bertingkat/Tidak	Bertingkat	
10.	Kondisi bangunan kantor	Baik	
11.	Gedung Ktr LKK	Dibangun Tahun 2019	
12.	Gedung CO Working	Dibangun Tahun 2019	
13.	Gedung Comand Center	Dibangun Tahun 2019	
14.	Gedung Youth Space	Dibangun Tahun 2022	Dibangun oleh Dinas Pendidikan

DATA SARANA KERJA KANTOR KECAMATAN RANCASARI

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Telepon Otomatis/non otomatis	1	
2	Radio Telekomunikasi	4	
3	Faximile	1	
4	Komputer	10	
5	Mesin Tik	3	
6	Laptop	8	
7	Meja Kursi Sice /Tamud	5	
8	Meja Kerja	18	
9	Kursi Kerja	18	
10	Meja Sidang	3	
11	Lemari besi	24	
12	Filing cabinet	10	
13	TV	8	



14	Handy cam	1	
15	Camera	1	
16	Ruang Rapat	1	
17	Aula / Gedung pertemuan	1	
18	Ruang data / Operation room Perekaman KTP	1	
19	Kendaraan Dinas Roda 2	13	
20	Ruang pelayanan		
21	Kendaraan Dinas Roda 4	4	

b. Kelembagaan Kecamatan Rancasari

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Rancasari dibagi dalam 4 Kelurahan dengan jumlah RT serta RW adalah sebagai berikut :

No	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW	Keterangan
1.	Cipamokolan	98	12	
2.	Derwati	84	13	Ada Pemekaran RT sebanyak 2 RT di RW 02 Tahun 2023
3.	Manjahlega	96	16	
4.	Mekarjaya	71	11	
	JUMLAH	349	52	

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Rancasari Tahun 2022

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancasari Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 52 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 19 orang merupakan pegawai di Kecamatan, di Kelurahan sebanyak 33 orang.

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekcam, Eselon IV sebanyak 26 orang yaitu Lurah, para Kepala Seksi Kecamatan, Subbbagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 24 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Rancasari, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.4

DAFTAR NAMA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANCASARI



NO	NAMA PEJABAT	JABATAN STRUKTURAL	KETERANGAN
1	2	3	5
1	Drs. H. HAMDANI, M.M	Camat	Kec. Rancasari
2	Drs. YOGASWARA HENDRAMURTI	Sekretaris Kecamatan	Kec. Rancasari
3	Desa Yanti Lase,S.Sos, M.Si	Kasie Pemerintahan	Kec. Rancasari
4	Hj. WISSI DOSITA RIFIATIN, SP., MM	Kasie Ekbang & Lingkungan Hidup	Kec. Rancasari
5	INDAH SUSANTY, S.Sos., M.Si	Kasie Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Rancasari
6	ARIS BUDIHARSA, S,T.,M.Si	Kasie Ketentraman & Ketertiban	Kec. Rancasari
7	NANANG KURNIA, SH, MM	Kasie Sosial	Kec. Rancasari
8	FINNI GANTINI ARIF, SP,MM	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kec. Rancasari
9	IWAN SAEPULOH, SE, MM	Subag Keuangan & Program	Kec. Rancasari
10	IRMA VITRIA DEVI, S.Sos	Bendahara Pengeluaran	Kec. Rancasari
11	UTEP MUSTIKA, SE	Pengadministrasi Umum	Kec. Rancasari
12	ENDANG HANDIANI, A.Md	Pengadministrasi Umum	Kec. Rancasari
13	SITI HUDEROH, S.A.P	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Kec. Rancasari
14	CUCU SOPIAN, SE	Pengadministrasi Pelayanan Khusus	Kec. Rancasari
15	TUTI ROSNAWATI, S.A.P	Verifikator Keuangan	Kec. Rancasari
16	JOHARUDIN SOLEH	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Kec. Rancasari
17	ENTIN KARTIKA, S.A.P	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kec. Rancasari
18	SABRINA, A.Md, S.Kom	Pengolah Data	Kec. Rancasari
19	DANI FARDANI,SE	Pengadministrasi Umum	Kec. Rancasari
20	TITO PRIHATIN, SP, MM	Lurah	Kel. Cipamokolan
21	ANDRI KUSNADI,S.Sos	Sekretaris Kelurahan	
22	AGUS MULYADI	Kasie Pemerintahan	Kel. Cipamokolan
23	WINDA WASTUTI, S.Sos, MM	Kasie Ekbang & Lingkungan Hidup	Kel. Cipamokolan
24	Hj. YULIA, S.Sos, MM	Kasi Kesos	Kel. Cipamokolan
25	CECEP PURNAMA, S.Kom,MM	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kel. Cipamokolan
26	ASEP KAMALUDIN AZIS, S.A.P	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kel. Cipamokolan
27	FEBRIZA PUTRA,S.AB	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Kel. Cipamokolan
28	MULYATI, S.A.P	Pengadministrasi Umum	Kel. Cipamokolan
29	RD. SLAMET BOEDHI HERMAWAN WIRADIKOESOEMAH,SP	Lurah	Kel. Derwati
30	ROZI SEPINTRA,S.IP	Sekretaris Kelurahan	Kel. Derwati
31	IKAH SOLIHAN, S.IP	Kasie Pemerintahan	Kel. Derwati
32	NANANG SASMITA, SE,MM	Kasie Ekbang & Lingkungan Hidup	Kel. Derwati
33	HENDRAYADI WIDIA,S.E	Kasie Kesejahteraan Sosial	Kel. Derwati
34	RYAN AGUSTIA LATUCONSINA, S.AB	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Kel. Derwati
35	ANNISA MUJAHIDAH,S.Sos	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kel. Derwati
36	MISDWIYANI RUSMEINAR	Pengadministrasi Umum	Kel. Derwati
37	DEDIH MUJAHID, S.A.P	Pengelola Keuangan	Kel. Derwati
38	EKA PRASETYA,SH	Lurah	Kel. Manjahlega
39	ARIEF BURHANUDDIN AM,SH	Sekretaris Kelurahan	Kel. Manjahlega
40	RENI ASMARA, A.Md	Kasie Pemerintahan	Kel. Manjahlega
41	MIDI GUSTISULISTIANA, S.Sos,MM	Kasie Ekbang & Lingkungan Hidup	Kel. Manjahlega
42	WAWAN SETIAWAN,S.E	Kasie Kesejahteraan Sosial	Kel. Manjahlega
43	TETEN, S.A.P	Pengelola Keuangan	Kel. Manjahlega
44	AMI LAKSMIASIH,SE	Pengadministrasi Umum	Kel. Manjahlega
45	FAISAL AKMAL HAKIM,S.I.P	Pengelola Data	Kel. Manjahlega
46	ADI AKHMAD SUDRAJAT,SIP	Lurah	Kel. Mekarjaya
47	IRA APRILIA,S.IP	Kasie Pemerintahan	Kel. Mekarjaya
48	ARUM SUKOWATI, SE	SEkretaris Kelurahan	Kel. Mekarjaya
49	RADEN GARMANA,SH	Kasie Kesejahteraan Masyarakat	Kel. Mekarjaya



50	DALAIL	Pengelola Keuangan	Kel. Mekarjaya
51	LILIS KURNIASIH,S.Pd	Pengadministrasi Umum	Kel. Mekarjaya
52	ENCEP SETIA MARDIANA	Pengadministrasi Umum	Kel. Mekarjaya

Sumber : Simpeg Desember Tahun 2022

Tabel. 1.5

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Ess 1	Ess 2	Ess 3	EsssIV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Rancasari			2	7	10	19
2	Kelurahan Cipamokolan				5	4	9
3	Kelurahan Derwati				5	4	9
4	Kelurahan Manjahlega				5	3	8
5	Kelurahan Mekarjaya				4	3	7
	JUMLAH			2	26	24	52

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Rancasari, Tahun 2022

Tabel 1.6

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Rancasari		9	4		6			20
2	Kelurahan Cipamokolan		4	4		1			9
3	Kelurahan Derwati		2	6		1			9
4	Kelurahan Manjahlega		1	6	1				8
5	Kelurahan Mekarjaya		0	5		2			7
	JUMLAH		16	25		10			52
	%		30,77	48,08	1,92	19,23			

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Rancasari, Bulan Desember Tahun 2022

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Rancasari Kota Bandung, yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 16 orang (30,77%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 25 orang (48,08%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 1 orang (1,92%), dan yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 10 orang (19,23%).

1.3. Tugas dan Fungsi

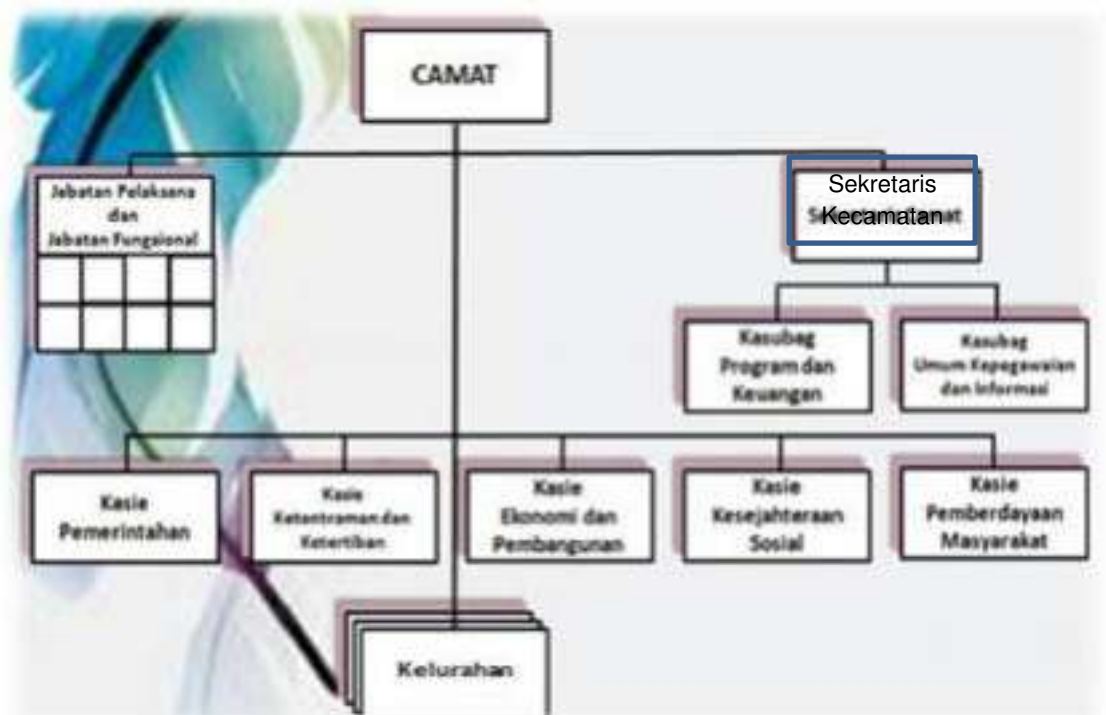


UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota / Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut. Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Kecamatan Rancasari Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD). Kecamatan Rancasari mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Rancasari mempunyai fungsi : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan publik dan Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Rancasari dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh apartur dibawahnya sesuai struktur organisasinya :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RANCASARI



Susunan organisaasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat;



2. Sekretaris Camat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Rancasari sejumlah 52 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Rancasari sebanyak 19 orang
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan sebanyak 33 orang
3. Tenaga Kontrak Kerja (TKK) di Kecamatan Rancasari dan Kelurahan sebanyak 43 orang;
4. Tenaga Operator Komputer 1 orang (status Tenaga aparatur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung).
5. Tenaga Bantuan Kebersihan Kelurahan sebanyak 63 orang dan Kecamatan 9 orang
6. Tenaga Linmas sebanyak sebanyak 52 orang (tiap kelurahan masing-masing sesuai jumlah RW) dan Kecamatan 25 orang

Selain itu sebagai perangkat daerah Camat mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Rancasari Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.4. Isu Strategis



Pemerintah Kecamatan Rancasari Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Rancasari Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Isu Lingkungan Hidup
2. Pencemaran lingkungan (ODF)
3. Banjir cileuncang
4. Penimbunan sampah
5. Stunting
6. Penyediaan RTH (Isu Infrastruktur)
7. Kemacetan lalu lintas
8. Ketersediaan transportasi umum
9. Buruknya drainase lingkungan
10. Kualitas jalan
11. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
12. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin
13. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran
14. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga
15. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
16. Isu Perkembangan teknologi dan informasi
17. Isu Reformasi Birokrasi

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan



ruang. indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancasari Kota Bandung. sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah. aman. cepat. efisien. dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan. pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja. pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis

Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang berkaitan dengan fungsi pelayanan pemerintah Kecamatan Rancasari ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk dijadikan dasar isu strategis antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan. pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Rancasari, sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005,



senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'.

Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Rancasari dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.



3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan



penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

1.4.1. Visi dan Misi

Visi Kecamatan Rancasari Kota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun adalah :

“KECAMATAN RANCASARI MANDIRI, AGAMIS, DAMAI, AMAN, NYAMAN DAN INDAH (MADANI)”

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kecamatan berdiri dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bandung. Kaitan dengan hal tersebut bahwa dalam setiap gerak langkah, aktivitas, tujuan, dan sasarannya harus mengacu dan mendukung arah kebijakan Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera.

Pernyataan visi sudah seharusnya mempertimbangkan beberapa hal seperti Kondisi Wilayah, karakteristik masyarakat, mencerminkan kekhasan wilayah, berorientasi pada hal-hal yang positif, mampu menjadi sumber motivasi dan pedoman melaksanakan program dan kegiatan, mengakomodir semua kepentingan yang membentuk watak dan karakter khas suatu wilayah.



Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Rancasari.
- 2 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Rancasari.
- 3 Meningkatkan Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan
- 4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Sasaran

1.4.2. Kaitannya Dengan Upaya Pencapaian SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota, meliputi:

1. SPM Pendidikan, dengan layanan pendidikan usia dini, pendidikan kesetaraan, pendidikan dasar.
2. SPM Kesehatan dengan kenis pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan Paud, Pelayanan kesehatan lansia.
3. SPM Pekerjaan Umum dengan layanan penyediaan air bersih, meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan.
4. SPM Perumahan Rakyat dengan pelayanan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak dan Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan dan Sehat Di Perkotaan
5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dengan layanan Peningkatan Kapasitas Anggota Anggota Perlindungan masyarakat (Linmas)
6. SPM Sosial dengan layanan Pemberian Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kecamatan Rancasari Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan keenam SPM tersebut. Kaitannya sangat erat dan selaras



dengan Visi Misi Kecamatan Rancasari baik dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Rancasari, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Sasaran dan Meningkatkan Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Rancasari.

1.4.3. Kaitannya Dengan Upaya Pencapaian SDGs

Sejak tahun 2015 berakhir, saat itulah akhir dari kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) ditetapkan, dan negara-negara diduniapun mulai merumuskan sebuah platform berkelanjutan untuk mencapai cita-cita mulai dari MDGs tersebut, sebuah platform baru dengan terminologi baru yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Baik MDGs maupun SDGs pada dasarnya memiliki persamaan cita-cita. Salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan di dunia. Namun ada hal lebih progresif yang dicantumkan di dalam SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030 mendatang. Adapun 8 (delapan) poin di dalam MDGs isu yang penting untuk dicermati yakni :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal maka indikator SDGs dapat diaplikasikan untuk mengukur realitas pada berbagai tingkat pembangunan baik global, nasional maupun ditingkat daerah, secara global SDGs pada tingkat daerah akan memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan pada suatu daerah yang dapat diperbandingkan (comparable) dengan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara global, dengan kata lain pengukuran indikator SDGs di daerah akan dapat menggambarkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah yang dibandingkan dengan tujuan pembangunan global.

Target dan tujuan SDGs secara eksplisit dimaksudkan untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan dalam hal pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energy, dan mengambil langkah urgen untuk



mengatasi perubahan iklim. Hal ini tergambar dalam 4 (empat) pilar SDGs yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum, pilar lingkungan. Secara umum, pilar, target dan tujuan SDGs juga relevan dengan tujuan pembangunan di Kecamatan Rancasari Pemerintah Kota Bandung.

1.4.4. Kaitannya Dengan Upaya Pencapaian IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, berbasis komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, antara lain:

- 1) mencakup umur panjang dan sehat;
- 2) pengetahuan, dan
- 3) kehidupan yang layak.

Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai 2017. Peningkatan IPM per tahun berkisar antara 0,17-0,69 poin. Kenaikan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,69, kenaikan IPM tersebut dikarenakan keempat indikator pembentuknya mengalami kenaikan dan 2 (dua) diantaranya mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (+0,3 tahun) dan pengeluaran per kapita (+561 ribu rupiah/ orang/ tahun).

Tabel 1.7
IPM Kota Bandung Tahun 2011-2017

Indikator Satuan	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pendidikan								
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,97	13,05	13,13	13,33	13,63	13,89	13,90
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,33	10,35	10,37	10,51	10,52	10,58	10,59
Kesehatan								
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,74	73,77	73,79	73,80	73,82	73,84	73,86



Standar Hidup Layak								
Pengeluaran per kapita	Ribu rupiah/ Orang/Tahun	14.700	14.763	14.957	15.048	15.609	15.805	16.033
Indeks Pembangunan Manusia		78.13	78.30	78.55	78.98	79,67	80,13	80,31

IPM Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai 2017. Peningkatan IPM per tahun berkisar antara 0,17-0,69 poin. Kenaikan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,69, kenaikan IPM tersebut dikarenakan keempat indikator pembentuknya mengalami kenaikan dan 2 (dua) diantaranya mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (+0,3 tahun) dan pengeluaran per kapita (+561 ribu rupiah/ orang/ tahun).

Kenaikan IPM ini hendaknya menjadi pemacu peran serta yang nyata dari segenap komponen masyarakat Kecamatan Rancasari Pemerintah Kota Bandung agar diperoleh hasil yang lebih optimal lagi. Akan tetapi perlu disadari bahwa investasi ini hasilnya tidak berdampak langsung secara instan karena investasi pembangunan manusia merupakan pembangunan jangka panjang



1.5. Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara REVISI Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08).
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023;
13. Keputusan Camat Rancasari Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2019-2023.



1.6. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Rancasari Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Kecamatan Rancasari Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Rancasari Nomor 136-Kec.Rcsr/2019 Tanggal 29 Maret Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Rancasari Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung



merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Rancasari Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Rancasari Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Adapun Visi dan misi RPJMD 2018-2023 Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah :

Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis

Misi

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih;
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan;
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaborasi dan terintegrasi.

Dalam rangka menunjang visi dan misi Wali Kota Bandung, maka Kecamatan Rancasari Kota Bandung menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi ke 2 dan ke 5 Wali Kota Bandung, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Keselarasan hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan sasaran antara Renstra dengan RPJMD Pemerintah Kota Bandung Tahun



2018-2023 terdapat pada **Misi 2** dan **Misi 5** RPJMD dapat dilihat berikut ini :

Tabel. 2.1
Keselarasn Tujuan Misi Pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan Misi pada RENSTRA Kecamatan Rancasari Tahun 2018-2023

TUJUAN MISI RPJMD 2018 – 2023	TUJUAN MISI RENSTRA KEC. RANCASARI 2018-2023
Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani..	Misi 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari. Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari Sasaran 2. Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Misi 3 : Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan	
Misi 4 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.	
Misi 5 : Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi..	Misi 2 : Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat Sasaran 3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Latar Belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 antara lain, dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Rancangan Akhir, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rekomendasi Kemenpan RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para Akademisi, terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan *Smart City*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi indikator tujuan sebelumnya indikator sasaran dengan maksud menyesuaikan level indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.



2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi "Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan" untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan Pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi perbandingan/persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.
4. Sasaran baru 'meningkatnya masyarakat kota yang humanis' diukur dengan indikator Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah.
6. Penambahan indikator dan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya kapasitas kinerja birokrasi.
7. Penurunan target indikator indeks daya saing pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter indeks daya saing pariwisata tersebut
8. Peningkatan target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR /PPKL / SAT/ REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.

10. Perubahan indikator Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan menjadi Persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/ *outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.
11. Perubahan Indikator Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan menjadi Persentase Penurunan Titik Genangan agar lebih berorientasi hasil/ *outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat

Berdasarkan perubahan RPJMD diatas, maka Renstra Kecamatan Rancasari juga mengalami perubahan yaitu **Perubahan Renstra** Kecamatan Rancasari terletak pada **Misi 5** Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi menjadi **Misi 1** Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing dan **Misi 2** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani.

Dengan Demikian Tujuan Renstra Perubahan Kecamatan Rancasari 2018-2023 adalah:

1. Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat dengan indikator tujuan Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Rancasari dengan Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari.

Perubahan tujuan dan sasaran serta indikator dan target Perubahan RENSTRA Kecamatan Rancasari Tahun 2018-2023 disajikan pada table dibawah ini :

Tabel. 2.2
Keselarasan Tujuan Misi Pada RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan Tujuan Misi pada RENSTRA Perubahan Kecamatan Rancasari Tahun 2018-2023

TUUAN MISI RPJMD PERUBAHAN 2018 – 2023	TUJUAN MISI RENSTRA PERUBAHAN KEC. RANCASARI 2018-2023
Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Misi 1 : Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Rancasari
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,	Misi 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Rancasari.



TUUAN MISI RPJMD PERUBAHAN 2018 – 2023	TUJUAN MISI RENSTRA PERUBAHAN KEC. RANCASARI 2018-2023
efisien, bersih dan melayani..	Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari
Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan	
Misi 4 :Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.	
Misi 5 : Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi..	

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Bandung yang dituangkan dalam Renstra Kecamatan Rancasari. Daerah Tahun 2018 – 2023 merupakan arah yang berkesinambungan dengan cara mengidentifikasi berbagai masalah, tantangan dan peluang pembangunan pada umumnya dan khususnya mengenai kewilyahan secara internal maupun eksternal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Mengidentifikasi berbagai masalah, tantangan dan peluang khususnya mengenai kepegawaian secara internal dan eksternal dengan cara menggunakan Analisa SWOT (strength, weakness, oportunity, threats). Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang dipilih adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis SWOT, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dipilih adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing				
1	Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	1. Meningkatnya Budaya Masyarakat Kota yang Rukun dan Tertib 2. Meningkatnya Budaya Gotong Royong Masyarakat dan Peran Pemuda Dalam	1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan



	Nilai Agama dan Budaya		Pembangunan	kecamatan Rancasari
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih				
1	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima 2. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2022 merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diukur berdasarkan potensi yang ada dan diimplementasikan melalui 4 program, 14 kegiatan, 26 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
 - 1.4.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - 2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
 - 2.3. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - 2.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - 2.4. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 2.4.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan



3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3.2.3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - 3.2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - 4.1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Rancasari Tahun 2019-2023 sebanyak 4 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Rancasari Kota Bandung sebagai berikut :



Tabel 2.4

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Rancasari Kota Bandung Sebelum Perubahan Renstra**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rancasari	80	81	82	83	84
		Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Kelurahan Unggul	75	75	75	75	75
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75	76	77	78	79

Tabel 2.5

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Rancasari Kota Bandung Setelah Perubahan Renstra**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari	Persentase siskamling RW Aktif	N/A	N/A	70	75	80
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	N/A	N/A	77	78	79
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Rancasari	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	80	81	85	85.50	86
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari	Persentase Kelurahan Unggul	75	75	75	100	100



2.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Rancasari Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Rancasari Kota Bandung Nomor : 10 Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022.

Tabel 2.6

**Indikator Kinerja Utama Sebelum Perubahan Renstra
Kecamatan Rancasari Kota Bandung 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rancasari	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan
2	Prosentase Kelurahan Unggul	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul di bawah ini :1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)- Ada kepengurusan- Ada program kerja- Mengikuti pelatihan- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)- Ada Kepengurusan- Gardu Sosial- Lumbung sosial- Peta Rawan Bencana- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca- Memiliki koleksi buku dange; 30 exp- Koran2 / majalah langganan kelurahan- Ada laporan pengunjung4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah- petunjuk arah ke masjid- ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alrm waktu sholat5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)- SK / SP- Ada Program Kerja- Monitoring Rawan Jentik-Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)- Data terpilah- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)- Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)- Adanya



		<p>kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK- Memiliki data anak- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA- Monitoring dan evaluasi8. Septic Tank Komunal (Ekbang)- Minimal untuk 5 rumah- Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon- Menggunakan bak kontrol9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)- Anggota Koperasi dange; 20 orang- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas- Memiliki Akte Pendirian- Ada usaha simpan pinjam11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)Kriteria:a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulanb. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulanc. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwuland. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblase. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting keringf. Melakukan penyiraman pada musim kemarau12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)- Ada Pengurus- Ada Anggota- Ada AD/ART</p>
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	% Rata-rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen



Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Kecamatan Rancasari Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari	Persentase siskamling RW Aktif	%	75
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Rancasari	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	%	78
3	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	85,50
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari	Persentase Kelurahan Unggul	%	100

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Triwulanan
Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari	Persentase siskamling RW Aktif	%	-	-	-	75
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Rancasari	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	%	-	-	-	78
3	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	85,50	85,50	85,50	85,50
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari	Persentase Kelurahan Unggul	%	-	-	-	100

**Perencanaan Strategis Hasil Reviu**

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Rancasari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rancasari Tahun 2022, sebagai berikut :

Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Rancasari terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Rancasari Tahun 2022

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Rancasari di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Rancasari Tahun 2022 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.9**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Rancasari Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	80	81	85	85.50	86
		Meningkatnya Penyelenggaraan	Persentase Kelurahan	%	75	75	75	100	100



		Pemerintahan	Unggul						
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Siskamling RW Aktif	%	n/a	n/a	70	75	80
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	n/a	n/a	77	78	79

Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancasari serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancasari hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.10

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Kec + Kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Ada Pelimpahan wewenang dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota	Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh kelurahan yang ada di Kec Rancasari dikali 100%	Kasi Kec + Kasi Kel	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini : 1.Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) 3.Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) 4.Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) 5.Pusat pelayanan dan kreativitas anak per kelurahan (PM) 6. Septic Tank Komunal (Ekbang) 7.Bank sampah per kelurahan (Ekbang) 8.Menciptakan 1



							koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir) (Ekbang) 9.Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) 10.Laporan RT RW Tepat Waktu (Kasi Pem)
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Siskamling RW Aktif	%	Yaitu Pelimpahan Kewenangan	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kasi Trantib dan Kasi Pem Kelurahan	Kriteria Siskamling RW Aktif:- Kepengurusan/kelembagaan- Jadwal Piket/ Ronda- Daftar Hadir- Buku Laporan Kejadian
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Berikut Janji Wali Kota	Jumlah LKK yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh LKK yang ada di kec dikali 100%	Kasi Pemberdayaan dan Kelurahan	Kriteria Unggul: 80% Kegiatan yang ada dalam Program DPA Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan mendukung RPJMD.

**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rancasari hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Camat Rancasari dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu****Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	85.50
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kelurahan Unggul	%	100
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Siskamling RW Aktif	%	75
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	78

2.5 Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Strategi pencapaian target kinerja tahun 2022 merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Kecamatan Rancasari untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diukur berdasarkan potensi yang ada dan diimplementasikan melalui program dan kegiatan yaitu :

Dari sebanyak 4 (empat) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 4 (empat) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. **24.974.299.403,-**



Tabel 2.12
Anggaran Kecamatan Rancasari Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Terkait langsung dengan Sasaran	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2022
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase siskamling RW Aktif	1.161.600.100
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	6.900.409.400
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	13.428.539.883
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	3.483.750.020
	Program : 4 Kegiatan : 14 Subkegiatan : 26		24.974.299.403



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Rancasari Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Rancasari.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja



utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Rancasari Kota Bandung
Tahun 2022**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Rancasari Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan maupun Rencana Kerja perubahan Tahun 2022. Sesuai



ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Renstra 2019-2023, Perjanjian Kinerja perubahan Kecamatan Rancasari Tahun 2022, hasil revisi dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancasari berdasarkan Keputusan Camat Rancasari Nomor : 37 TAHUN 2021 tanggal 14 Desember 2021 telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Rancasari Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 dan melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 060/Kep.497-Orpad/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019 – 2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Rancasari Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.



Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Rancasari Kota Bandung tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Rancasari Kota Bandung
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Siskamling RW Aktif	%	75	84.62	112.83
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	78	90.60	116.15
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	85.50	88.43	103.43
4	Persentase Kelurahan Unggul	%	100	100	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Siskamling RW Aktif, dengan capaian kinerja 112.83 %, pada indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dengan capaian kinerja 116.15 %, pada indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari, dengan capaian kinerja 103.43 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 100.00 %.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Rancasari Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran



yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Rancasari, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Rancasari Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Siskamling RW Aktif	%	75	84.62	112.83
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	78	90.60	116.15
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	85.50	88.43	103.43
4	Persentase Kelurahan Unggul	%	100	100	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 4

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	75.00 %
2	Sesuai Target	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00
2	Misi 2	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00
	Jumlah	4	3	75.00	1	25.00	0	0.00

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Rancasari Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50.00 %
2	Sesuai Target	1	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Siskamling RW Aktif	%	n/a	-	0.00	n/a	-	0.00	70	82.44	117.77	75	84.62	112.83

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu "Persentase Siskamling RW Aktif " sebagai berikut :



Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator	Persentase siskamling RW Aktif merupakan indikator sasaran dari Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari yang ada di Perubahan Renstra Kecamatan Rancasari yang selaras dan yang mendukung ketercapaian misi ke 1 Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yaitu Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing dengan tujuan Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat yang indikator tujuannya adalah Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan dan merupakan tugas dan fungsi dari kecamatan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :Persentase Siskamling RW Aktif																																						
Instrumen atau cara pengukuran Indikator	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%, Kriteria Siskamling Aktif : <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga) 																																						
Kinerja nyata dengan Rencana	<p>Realisasi Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Siskamling RW Aktif " adalah sebesar 84.62 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 112.83 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan dapat dilihat pada table dibawah ini :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">KELURAHAN</th> <th colspan="2">NILAI UNSUR PERSENTASE SISKAMLING RW AKTIF</th> </tr> <tr> <th>JUMLAH RW</th> <th>JUMLAH SISKAMLING RW AKTIF</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cipamakolan</td> <td>12</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Derwati</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Manjahlegai</td> <td>16</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mekarjaya</td> <td>11</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td>52</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kinerja Persentase Siskamling RW Aktif</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">84.62% dari target 75%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Capaian Kinerja Persentase Siskamling RW Aktif</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">112,83%</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KELURAHAN	NILAI UNSUR PERSENTASE SISKAMLING RW AKTIF		JUMLAH RW	JUMLAH SISKAMLING RW AKTIF	(1)	(2)	(3)	(4)	1	Cipamakolan	12	9	2	Derwati	13	13	3	Manjahlegai	16	13	4	Mekarjaya	11	9	JUMLAH		52	44	Kinerja Persentase Siskamling RW Aktif		84.62% dari target 75%		Capaian Kinerja Persentase Siskamling RW Aktif		112,83%	
NO	KELURAHAN			NILAI UNSUR PERSENTASE SISKAMLING RW AKTIF																																			
		JUMLAH RW	JUMLAH SISKAMLING RW AKTIF																																				
(1)	(2)	(3)	(4)																																				
1	Cipamakolan	12	9																																				
2	Derwati	13	13																																				
3	Manjahlegai	16	13																																				
4	Mekarjaya	11	9																																				
JUMLAH		52	44																																				
Kinerja Persentase Siskamling RW Aktif		84.62% dari target 75%																																					
Capaian Kinerja Persentase Siskamling RW Aktif		112,83%																																					
Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya	Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Siskamling RW Aktif " tahun ini menurun 4.94 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 117.77																																						
Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan	Capaian di Tahun 2022 sama dengan capaian di akhir tahun berjalan yaitu Realisasi kinerja indicator "Persentase Siskamling RW Aktif" adalah sebesar 84,62 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 112,83%, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Rancasari maka capaian kinerjanya mencapai 105.78 %																																						
Perbandingan dengan Target Renstra Akhir Tahun	Realisasi kinerja indicator "Persentase Siskamling RW Aktif" persentase capaian kinerjanya adalah 112,83%, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan, bila dibandingkan dengan target akhir renstra dengan Target 80% maka capaian kinerjanya mencapai 105.78 %																																						

**Perbandingan
kinerja dengan
kinerja instansi
lainnya**

Capaian Kinerja Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Rancasari pada Tahun 2022 ini dibandingkan dengan 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung maka capaian Kinerja Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Rancasari cukup baik dan ada di urutan nomor 7 dari 30 Kecamatan, seperti yang ada di Tabel dibawah ini :

**PERBANDINGAN DATA IKU PERSENTASE SISKAMLING RW AKTIF KECAMATAN SE
KOTA BANDUNG TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	PERSENTASE SISKAMLING RW AKTIF		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kecamatan Coblong	65,00	100,00	153,85
2	Kecamatan Lengkong	59,87	81,54	136,20
3	Kecamatan Bandung Kidul	65,00	86,00	132,31
4	Kecamatan Antapani	78,00	100,00	128,21
5	Kecamatan Cidadap	41,21	51,72	125,50
6	Kecamatan Cibeunying Kaler	54,35	63,04	115,99
7	Kecamatan Rancasari	75,00	84,62	112,83
8	Kecamatan Panyileukan	56,76	62,16	109,51
9	Kecamatan Bojongloa Kidul	65,91	71,11	107,89
10	Kecamatan Sukasari	80,00	85,00	106,25
11	Kecamatan Cicendo	71,43	75,00	105,00
12	Kecamatan Astana Anyar	63,00	65,96	104,70
13	Kecamatan Arcamanik	83,33	85,19	102,23
14	Kecamatan Andir	61,11	61,72	101,00
15	Kecamatan Gedebage	87,00	87,08	100,09
16	Kecamatan Babakan Ciparay	52,60	52,60	100,00
17	Kecamatan Bandung Wetan	80,56	80,56	100,00
18	Kecamatan Batununggal	79,52	79,52	100,00
19	Kecamatan Bojongloa Kaler	100,00	100,00	100,00
20	Kecamatan Buahbatu	63,64	63,64	100,00
21	Kecamatan Cibeunying Kidul	48,28	48,28	100,00
22	Kecamatan Cibiru	58,49	58,49	100,00
23	Kecamatan Cinambo	91,30	91,30	100,00
24	Kecamatan Kiaracondong	96,47	96,47	100,00
25	Kecamatan Mandalajati	62,00	62,00	100,00
26	Kecamatan Regol	85,00	85,00	100,00
27	Kecamatan Sukajadi	73,47	73,47	100,00
28	Kecamatan Sumur Bandung	56,76	56,76	100,00
29	Kecamatan Ujungberung	94,92	94,92	100,00
30	Kecamatan Bandung Kulon	75,00	65,31	87,08

**Output
program/kegiatan
dan keuangan**

1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Siskamling RW Aktif (Persen) Anggaran Rp. 1.161.600.100
 1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah : Jumlah RW yang memiliki Siskamling aktif (RW) Rp. 1.161.600.100
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Melaksanakan pembinaan siskamling RW se Kecamatan : Jumlah pembinaan Siskamling RW (RW) Rp. 461.232.700
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Melaksanakan pembinaan siskamling RW di Kelurahan Cipamokolan: Jumlah pembinaan Siskamling RW Rp. 150.000.000
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Melaksanakan pembinaan siskamling RW di Kelurahan Derwati : Jumlah pembinaan Siskamling RW Rp. 150.000.000

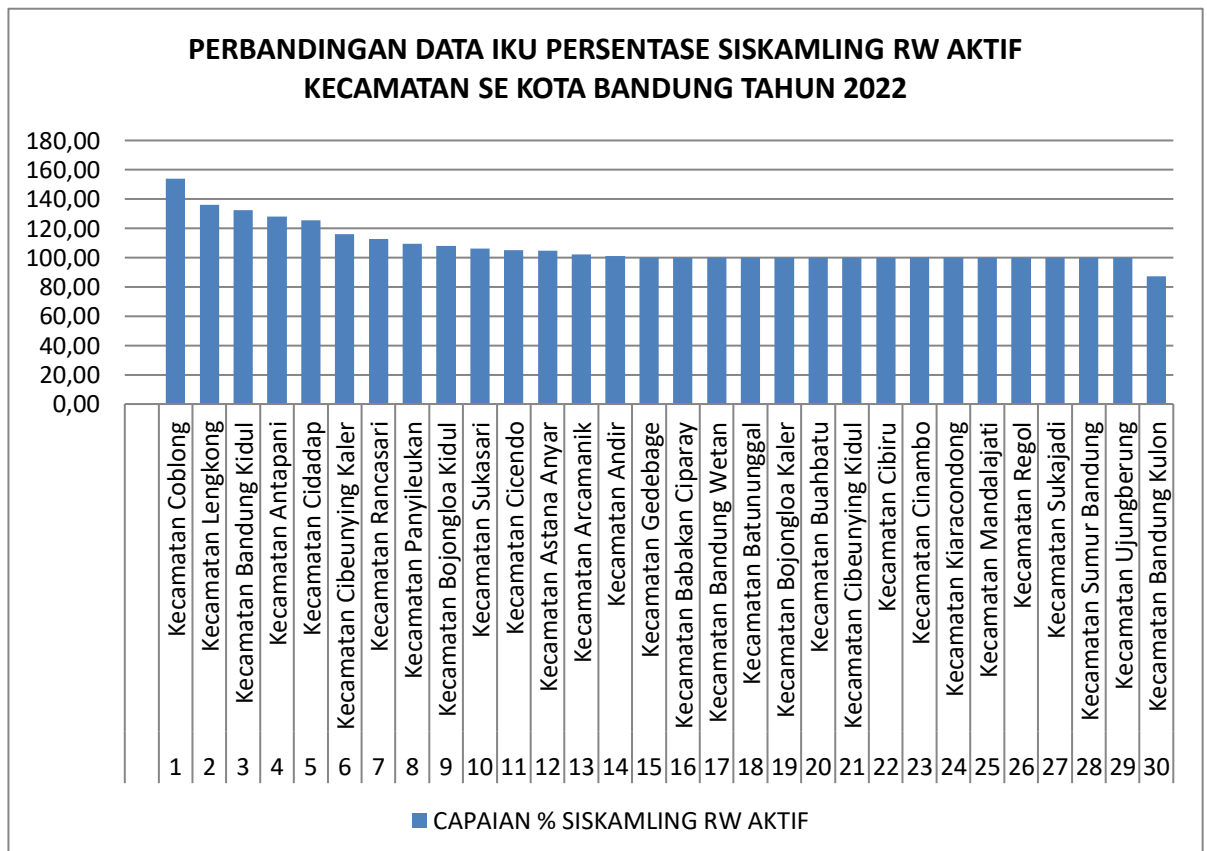


	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Melaksanakan pembinaan siskamling RW di Kelurahan Manjahlega : Jumlah pembinaan Siskamling RW Rp. 242.117.400 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Melaksanakan pembinaan siskamling RW di Kelurahan Mekarjaya : Jumlah pembinaan Siskamling RW Rp.158.250.000
Faktor pendukung	adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Faktor Penghambat	Kurangnya pembinaan dari aparat kelurahan dan kecamatan terhadap siskamling yang ada di RW
Solusi	Untuk meningkatkan capaian indikator persentase siskamling RW aktif berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas. maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :Meningkatkan pembinaan terhadap siskamling

Berikut Grafik data Capaian Sasaran 1 Persentase Siskamling RW Aktif Tahun 2022 :

Grafik 1.

Perbandingan Kinerja Utama Sasaran 1 Persentase Siskamling RW Aktif dengan 30 Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2022



Bila melihat grafik diatas untuk capaian Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Rancasari masuk rangking 7, semua kecamatan mencapai 100% dari yang ditargetkan.

**Sasaran 2**

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7**Analisis Pencapaian Sasaran 2****Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	n/a	-	0.00	n/a	-	0.00	77	84.81	110.14	78	90.60	116.15

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator	Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung, Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materiil. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di kewilayahan berorientasi pada pembangunan masyarakat setempat, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat kelurahan dengan didukung pendampingan teknis, pengawasan dan menyiapkan teknis pengadaan sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan transparan melalui pendekatan inovasi, desentralisasi dan kolaborasi.
Instrumen atau cara pengukuran Indikator	Jumlah LKK yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan Jumlah seluruh LKK yang ada di Kecamatan dikali 100% Kriteria LKK Unggul, setiap LKK yang dapat melaksanakan sejumlah kegiatan sebanyak 80% uang menjangk RPJMD dari nilai DPA.
Kinerja nyata dengan Rencana	Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul " adalah sebesar 90.60 dari target sebesar 78 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 4 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 116.15 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.
Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya	Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul " tahun ini meningkat 6.01 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 110.14



Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan	<p>Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul " tahun ini adalah 90,60% dengan capaian kinerja sebesar 116.15 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Rancasari maka capaian kerjanya mencapai 114.68 %.</p> <p style="text-align: center;">Nilai Unsur Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Rancasari Tahun 2022</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">KELURAHAN</th> <th colspan="2">NILAI UNSUR PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN UNGGUL</th> </tr> <tr> <th>JUMLAH LKK</th> <th>JUMLAH LKK YANG UNGGUL</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cipamokolan</td> <td>15</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Derwati</td> <td>16</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Manjahlega</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mekarjaya</td> <td>14</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td> <td>64</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kinerja Persentase Lemabaga Kemasyarakatan Unggul</td> <td colspan="2">90,60%</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KELURAHAN	NILAI UNSUR PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN UNGGUL		JUMLAH LKK	JUMLAH LKK YANG UNGGUL	(1)	(2)	(3)	(4)	1	Cipamokolan	15	14	2	Derwati	16	14	3	Manjahlega	19	17	4	Mekarjaya	14	13	JUMLAH		64	58	Kinerja Persentase Lemabaga Kemasyarakatan Unggul		90,60%																																																																	
NO	KELURAHAN			NILAI UNSUR PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN UNGGUL																																																																																															
		JUMLAH LKK	JUMLAH LKK YANG UNGGUL																																																																																																
(1)	(2)	(3)	(4)																																																																																																
1	Cipamokolan	15	14																																																																																																
2	Derwati	16	14																																																																																																
3	Manjahlega	19	17																																																																																																
4	Mekarjaya	14	13																																																																																																
JUMLAH		64	58																																																																																																
Kinerja Persentase Lemabaga Kemasyarakatan Unggul		90,60%																																																																																																	
Perbandingan dengan Target Renstra Akhir Tahun	<p>capaian kinerja indikator 1 "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul " tahun ini adalah 90,60%,bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Rancasari dengan target 79% maka capaian kerjanya mencapai 114.68 %</p>																																																																																																		
Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya	<p>Bila dibandingkan dengan 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung maka capaian Kinerja Persentase Lembaga Kemsayarakatan Unggul Kecamatan Rancasari pada Tahun 2022 ini cukup baik dan ada di urutan nomor 4 dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung, seperti terlihat pada Tabel dibawah ini :</p> <p style="text-align: center;">PERBANDINGAN DATA IKU PERSENTASE LKK UNGGUL KECAMATAN SE KOTA BANDUNG TAHUN 2022</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">KECAMATAN</th> <th colspan="3">% LKK UNGGUL</th> </tr> <tr> <th>TARGET</th> <th>REALISASI</th> <th>% CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kecamatan Andir</td> <td>59,19</td> <td>91,37</td> <td>154,37</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kecamatan Lengkong</td> <td>69,75</td> <td>96,51</td> <td>138,37</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kecamatan Astana Anyar</td> <td>75,00</td> <td>88,66</td> <td>118,21</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>4</td> <td>Kecamatan Rancasari</td> <td>78,00</td> <td>90,60</td> <td>116,15</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kecamatan Ujungberung</td> <td>70,00</td> <td>81,08</td> <td>115,83</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kecamatan Gedebage</td> <td>70,00</td> <td>81,00</td> <td>115,71</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kecamatan Bandung Kulon</td> <td>84,50</td> <td>97,46</td> <td>115,34</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kecamatan Cibeunying Kaler</td> <td>68,97</td> <td>79,31</td> <td>114,99</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kecamatan Arcamanik</td> <td>75,69</td> <td>86,36</td> <td>114,10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kecamatan Cibiru</td> <td>82,00</td> <td>91,00</td> <td>110,98</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Kecamatan Bojongloa Kidul</td> <td>78,00</td> <td>85,32</td> <td>109,38</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Kecamatan Babakan Ciparay</td> <td>82,00</td> <td>88,76</td> <td>108,24</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Kecamatan Sumur Bandung</td> <td>77,50</td> <td>83,33</td> <td>107,52</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Kecamatan Bojongloa Kaler</td> <td>80,00</td> <td>83,42</td> <td>104,28</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Kecamatan Cidadap</td> <td>83,33</td> <td>86,84</td> <td>104,21</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Kecamatan Sukasari</td> <td>82,00</td> <td>84,64</td> <td>103,22</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Kecamatan Bandung Kidul</td> <td>77,00</td> <td>79,00</td> <td>102,60</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Kecamatan Panyileukan</td> <td>70,00</td> <td>71,42</td> <td>102,03</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KECAMATAN	% LKK UNGGUL			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	1	Kecamatan Andir	59,19	91,37	154,37	2	Kecamatan Lengkong	69,75	96,51	138,37	3	Kecamatan Astana Anyar	75,00	88,66	118,21	4	Kecamatan Rancasari	78,00	90,60	116,15	5	Kecamatan Ujungberung	70,00	81,08	115,83	6	Kecamatan Gedebage	70,00	81,00	115,71	7	Kecamatan Bandung Kulon	84,50	97,46	115,34	8	Kecamatan Cibeunying Kaler	68,97	79,31	114,99	9	Kecamatan Arcamanik	75,69	86,36	114,10	10	Kecamatan Cibiru	82,00	91,00	110,98	11	Kecamatan Bojongloa Kidul	78,00	85,32	109,38	12	Kecamatan Babakan Ciparay	82,00	88,76	108,24	13	Kecamatan Sumur Bandung	77,50	83,33	107,52	14	Kecamatan Bojongloa Kaler	80,00	83,42	104,28	15	Kecamatan Cidadap	83,33	86,84	104,21	16	Kecamatan Sukasari	82,00	84,64	103,22	17	Kecamatan Bandung Kidul	77,00	79,00	102,60	18	Kecamatan Panyileukan	70,00	71,42	102,03
NO	KECAMATAN			% LKK UNGGUL																																																																																															
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN																																																																																															
1	Kecamatan Andir	59,19	91,37	154,37																																																																																															
2	Kecamatan Lengkong	69,75	96,51	138,37																																																																																															
3	Kecamatan Astana Anyar	75,00	88,66	118,21																																																																																															
4	Kecamatan Rancasari	78,00	90,60	116,15																																																																																															
5	Kecamatan Ujungberung	70,00	81,08	115,83																																																																																															
6	Kecamatan Gedebage	70,00	81,00	115,71																																																																																															
7	Kecamatan Bandung Kulon	84,50	97,46	115,34																																																																																															
8	Kecamatan Cibeunying Kaler	68,97	79,31	114,99																																																																																															
9	Kecamatan Arcamanik	75,69	86,36	114,10																																																																																															
10	Kecamatan Cibiru	82,00	91,00	110,98																																																																																															
11	Kecamatan Bojongloa Kidul	78,00	85,32	109,38																																																																																															
12	Kecamatan Babakan Ciparay	82,00	88,76	108,24																																																																																															
13	Kecamatan Sumur Bandung	77,50	83,33	107,52																																																																																															
14	Kecamatan Bojongloa Kaler	80,00	83,42	104,28																																																																																															
15	Kecamatan Cidadap	83,33	86,84	104,21																																																																																															
16	Kecamatan Sukasari	82,00	84,64	103,22																																																																																															
17	Kecamatan Bandung Kidul	77,00	79,00	102,60																																																																																															
18	Kecamatan Panyileukan	70,00	71,42	102,03																																																																																															



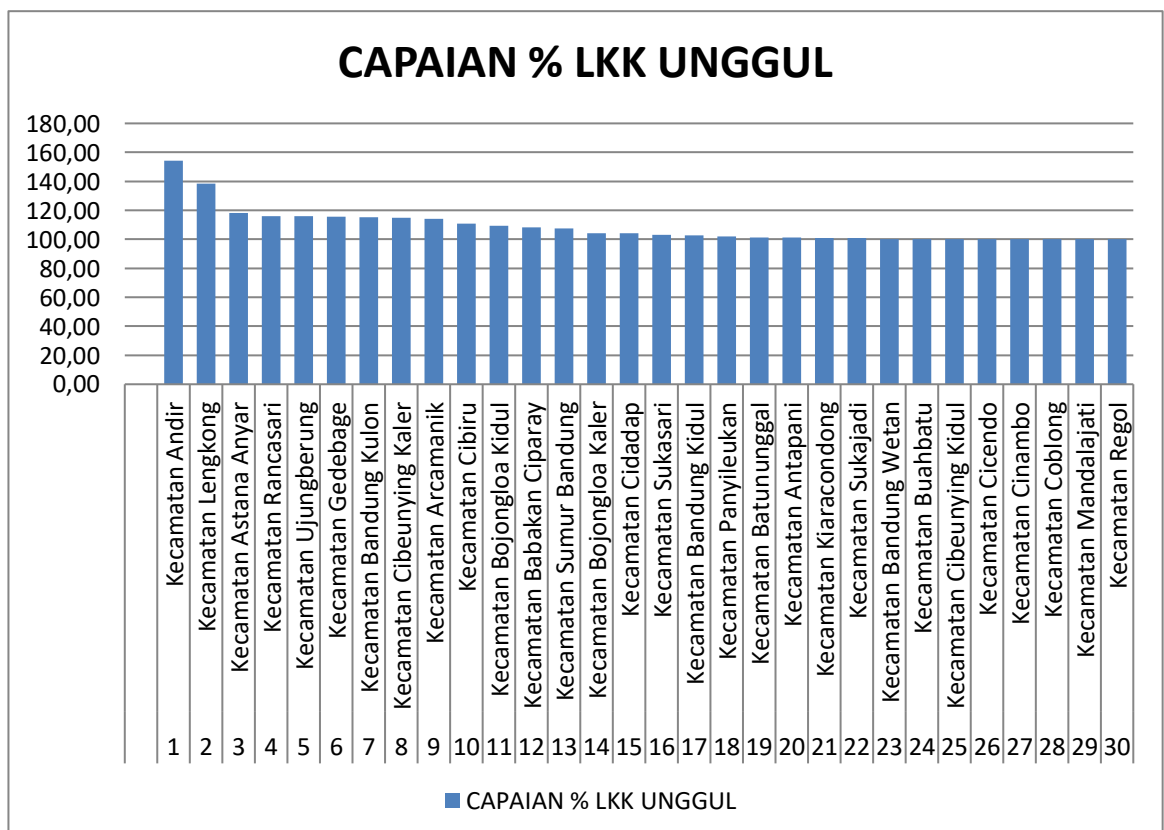
	19	Kecamatan Batununggal	82,38	83,33	101,15
	20	Kecamatan Antapani	81,00	81,90	101,11
	21	Kecamatan Kiaracondong	75,00	75,73	100,97
	22	Kecamatan Sukajadi	79,00	79,69	100,87
	23	Kecamatan Bandung Wetan	84,44	84,44	100,00
	24	Kecamatan Buahbatu	74,62	74,62	100,00
	25	Kecamatan Cibeunying Kidul	82,86	82,86	100,00
	26	Kecamatan Cicendo	81,65	81,65	100,00
	27	Kecamatan Cinambo	86,21	86,21	100,00
	28	Kecamatan Coblong	93,71	93,71	100,00
	29	Kecamatan Mandalajati	79,00	79,00	100,00
30	Kecamatan Regol	67,90	67,90	100,00	
Output program/kegiatan dan keuangan	<p>1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul (Persen) 6.900.409.400</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan (Persen) Rp. 6.715.535.900 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kasi Ekbang) Persiapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Musrembang Kecamatan Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (dokumen) Rp. 23.535.900 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PIPPK RW) Melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Cipamokolan Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi (Kegiatan) Rp. 1.273.000.000 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PIPPK RW) Melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Derwati Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi (Kegiatan) Rp. 1.373.000.000 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PIPPK RW) Melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Manjahlega Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi (Kegiatan) Rp. 1.673.000.000 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PIPPK RW) Melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mekarjaya Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi (Kegiatan) Rp. 1.173.000.000 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (PIPPK pkk,karta,lpm) Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipamokolan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi (Kegiatan) Rp. 300.000.000 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (PIPPK pkk,karta,lpm) Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Derwati Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi (Kegiatan) Rp. 300.000.000 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (PIPPK pkk,karta,lpm) Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manjahlega Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi (Kegiatan) Rp. 300.000.000 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (PIPPK pkk,karta,lpm) Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekarjaya Jumlah Pemberdayaan 				



	<p>Masyarakat di kelurahan terrealisasi (Kegiatan) Rp. 300.000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina (Persen) Rp. 184.873.500 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Melaksanakan monitoring dan evaluasi posyandu di kelurahan se Kecamatan jumlah Posyandu Purnama (unit) Rp.164.256.000 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Melaksanakan pembinaan UKM se Kecamatan jumlah UKM yang terbina (Unit UKM) Rp. 20.617.500
Faktor pendukung	<p>Pendukung pencapaian indicator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Rancasari adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi yang mendukung terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pemenuhan Janji Kepala Daerah yakni Perwal PIPPK. 2. Peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan masyarakat Kecamatan Rancasari
Faktor Penghambat	-
Solusi	<p>Solusi dari masalah yang dihadapi :Meningkatkan Koordinasi antara Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Rancasari guna penyamaan persepsi dan kesatuan pemahaman dalam pemberdayaan masyarakat.Perlu adanya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan warga masyarakat pada masa pandemi covid 19 ini seperti ketersediaan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun, setiap ruangan disediakan hand sanitizer, pemberian masker</p>

Grafik. 2

Perbandingan Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Dengan 30 Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2022





Dari grafik Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Rancasari masuk dalam urutan nomor 4 dari 30 Kecamatan dengan capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul mencapai 90,60%

Sasaran 3

Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2022
Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	80	84.8	106.00	81	89.59	110.61	85	85.96	101.13	85.50	88.43	103.43

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Rancasari merupakan sasaran yang mendukung ketercapaian misi ke 2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan merupakan tugas dan fungsi dari kecamatan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Kepuasan Masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sangat penting untuk diketahui seberapa besar kinerja aparat dalam melayani masyarakat di wilayah. Penggunaan media sangat penting dalam penyebaran informasi pelayanan publik agar informasi dapat sampai ke lapisan masyarakat bawah. Kepuasan Masyarakat perlu menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja dengan menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan#160;pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dengan meningkatkan kinerja diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga kepuasan masyarakat dapat tercapai.
Instrumen atau cara pengukuran Indikator	Instrumen Pengukurannya dengan menggunakan 9 unsur sesuai Permenpan 14 Tahun 2017. Pedoman umum ini diterapkan terhadap seluruh unit pelayanan yang ada di Kecamatan Rancasari, sebagai instrumen penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing, yaitu dengan menghitung Rata-Rata IKM Kecamatan dan Kelurahan
Kinerja nyata	Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



dengan Rencana	Kecamatan Rancasari" adalah sebesar 88.43 dari target sebesar 85.50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 4 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103.43 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan																																																																																																																																					
Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya	Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari" tahun ini meningkat 2.30 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.13																																																																																																																																					
Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan	Tahun 4 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari" tahun ini adalah sebesar 103.43 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Rancasari maka capaian kerjanya mencapai 102.83 %.																																																																																																																																					
Kinerja nyata dengan target akhir Renstra	capaian kinerja indikator 1 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari" tahun ini adalah sebesar 103.43 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Rancasari maka capaian kerjanya mencapai 102.83 %.																																																																																																																																					
Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya	<p>Jika dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja di 30 kecamatan yang ada di kota Bandung, maka capaian kinerja kecamatan Rancasari cukup baik dan masuk 10 besar nilai rata-rata IKM yang ada dan masuk urutan nomor 6 dari 30 Kecamatan se Kota Bandung</p> <p style="text-align: center;">PERBANDINGAN DATA IKU IKM KECAMATAN SE KOTA BANDUNG TAHUN 2022</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">KECAMATAN</th> <th colspan="3">NILAI RATA-RATA IKM</th> </tr> <tr> <th>TARGET</th> <th>REALISASI</th> <th>% CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Kecamatan Coblong</td><td>84,97</td><td>93,21</td><td>109,70</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kecamatan Gedebage</td><td>84,50</td><td>91,21</td><td>107,94</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kecamatan Babakan Ciparay</td><td>81,80</td><td>84,97</td><td>103,88</td></tr> <tr><td>4</td><td>Kecamatan Cidadap</td><td>82,00</td><td>85,03</td><td>103,70</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kecamatan Bandung Kidul</td><td>86,00</td><td>89,17</td><td>103,69</td></tr> <tr style="background-color: yellow;"><td>6</td><td>Kecamatan Rancasari</td><td>85,50</td><td>88,43</td><td>103,43</td></tr> <tr><td>7</td><td>Kecamatan Andir</td><td>81,80</td><td>84,49</td><td>103,29</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kecamatan Sukasari</td><td>84,00</td><td>86,37</td><td>102,82</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kecamatan Antapani</td><td>86,50</td><td>88,78</td><td>102,64</td></tr> <tr><td>10</td><td>Kecamatan Astana Anyar</td><td>84,00</td><td>85,85</td><td>102,20</td></tr> <tr><td>11</td><td>Kecamatan Cinambo</td><td>83,91</td><td>85,72</td><td>102,16</td></tr> <tr><td>12</td><td>Kecamatan Regol</td><td>83,80</td><td>85,43</td><td>101,95</td></tr> <tr><td>13</td><td>Kecamatan Sumur Bandung</td><td>84,00</td><td>85,58</td><td>101,88</td></tr> <tr><td>14</td><td>Kecamatan Ujungberung</td><td>84,00</td><td>85,40</td><td>101,67</td></tr> <tr><td>15</td><td>Kecamatan Bandung Wetan</td><td>83,25</td><td>84,60</td><td>101,62</td></tr> <tr><td>16</td><td>Kecamatan Cibeunying Kaler</td><td>86,50</td><td>87,72</td><td>101,41</td></tr> <tr><td>17</td><td>Kecamatan Batununggal</td><td>85,00</td><td>86,14</td><td>101,34</td></tr> <tr><td>18</td><td>Kecamatan Buahbatu</td><td>84,00</td><td>85,00</td><td>101,19</td></tr> <tr><td>19</td><td>Kecamatan Kiaracondong</td><td>84,25</td><td>85,18</td><td>101,10</td></tr> <tr><td>20</td><td>Kecamatan Bandung Kulon</td><td>84,50</td><td>85,24</td><td>100,88</td></tr> <tr><td>21</td><td>Kecamatan Arcamanik</td><td>84,00</td><td>84,66</td><td>100,79</td></tr> <tr><td>22</td><td>Kecamatan Bojongloa Kaler</td><td>84,40</td><td>85,04</td><td>100,76</td></tr> <tr><td>23</td><td>Kecamatan Cibiru</td><td>85,00</td><td>85,48</td><td>100,56</td></tr> <tr><td>24</td><td>Kecamatan Lengkong</td><td>85,35</td><td>85,83</td><td>100,56</td></tr> <tr><td>25</td><td>Kecamatan Mandalajati</td><td>85,00</td><td>85,45</td><td>100,53</td></tr> </tbody> </table>	NO	KECAMATAN	NILAI RATA-RATA IKM			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	1	Kecamatan Coblong	84,97	93,21	109,70	2	Kecamatan Gedebage	84,50	91,21	107,94	3	Kecamatan Babakan Ciparay	81,80	84,97	103,88	4	Kecamatan Cidadap	82,00	85,03	103,70	5	Kecamatan Bandung Kidul	86,00	89,17	103,69	6	Kecamatan Rancasari	85,50	88,43	103,43	7	Kecamatan Andir	81,80	84,49	103,29	8	Kecamatan Sukasari	84,00	86,37	102,82	9	Kecamatan Antapani	86,50	88,78	102,64	10	Kecamatan Astana Anyar	84,00	85,85	102,20	11	Kecamatan Cinambo	83,91	85,72	102,16	12	Kecamatan Regol	83,80	85,43	101,95	13	Kecamatan Sumur Bandung	84,00	85,58	101,88	14	Kecamatan Ujungberung	84,00	85,40	101,67	15	Kecamatan Bandung Wetan	83,25	84,60	101,62	16	Kecamatan Cibeunying Kaler	86,50	87,72	101,41	17	Kecamatan Batununggal	85,00	86,14	101,34	18	Kecamatan Buahbatu	84,00	85,00	101,19	19	Kecamatan Kiaracondong	84,25	85,18	101,10	20	Kecamatan Bandung Kulon	84,50	85,24	100,88	21	Kecamatan Arcamanik	84,00	84,66	100,79	22	Kecamatan Bojongloa Kaler	84,40	85,04	100,76	23	Kecamatan Cibiru	85,00	85,48	100,56	24	Kecamatan Lengkong	85,35	85,83	100,56	25	Kecamatan Mandalajati	85,00	85,45	100,53
NO	KECAMATAN			NILAI RATA-RATA IKM																																																																																																																																		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN																																																																																																																																		
1	Kecamatan Coblong	84,97	93,21	109,70																																																																																																																																		
2	Kecamatan Gedebage	84,50	91,21	107,94																																																																																																																																		
3	Kecamatan Babakan Ciparay	81,80	84,97	103,88																																																																																																																																		
4	Kecamatan Cidadap	82,00	85,03	103,70																																																																																																																																		
5	Kecamatan Bandung Kidul	86,00	89,17	103,69																																																																																																																																		
6	Kecamatan Rancasari	85,50	88,43	103,43																																																																																																																																		
7	Kecamatan Andir	81,80	84,49	103,29																																																																																																																																		
8	Kecamatan Sukasari	84,00	86,37	102,82																																																																																																																																		
9	Kecamatan Antapani	86,50	88,78	102,64																																																																																																																																		
10	Kecamatan Astana Anyar	84,00	85,85	102,20																																																																																																																																		
11	Kecamatan Cinambo	83,91	85,72	102,16																																																																																																																																		
12	Kecamatan Regol	83,80	85,43	101,95																																																																																																																																		
13	Kecamatan Sumur Bandung	84,00	85,58	101,88																																																																																																																																		
14	Kecamatan Ujungberung	84,00	85,40	101,67																																																																																																																																		
15	Kecamatan Bandung Wetan	83,25	84,60	101,62																																																																																																																																		
16	Kecamatan Cibeunying Kaler	86,50	87,72	101,41																																																																																																																																		
17	Kecamatan Batununggal	85,00	86,14	101,34																																																																																																																																		
18	Kecamatan Buahbatu	84,00	85,00	101,19																																																																																																																																		
19	Kecamatan Kiaracondong	84,25	85,18	101,10																																																																																																																																		
20	Kecamatan Bandung Kulon	84,50	85,24	100,88																																																																																																																																		
21	Kecamatan Arcamanik	84,00	84,66	100,79																																																																																																																																		
22	Kecamatan Bojongloa Kaler	84,40	85,04	100,76																																																																																																																																		
23	Kecamatan Cibiru	85,00	85,48	100,56																																																																																																																																		
24	Kecamatan Lengkong	85,35	85,83	100,56																																																																																																																																		
25	Kecamatan Mandalajati	85,00	85,45	100,53																																																																																																																																		



	26	Kecamatan Panyileukan	85,20	85,62	100,49
	27	Kecamatan Bojongloa Kidul	85,00	85,26	100,31
	28	Kecamatan Cibeunying Kidul	84,78	85,01	100,27
	29	Kecamatan Sukajadi	84,00	84,17	100,20
	30	Kecamatan Cicendo	85,86	85,96	100,12
Output program/kegiatan dan keuangan	<p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA (ADUM) Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (Non Akumulasi) 13.428.539.883</p> <p>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Persen) Rp. 74.709.400</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Melaksanakan Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Penetapan perencanaan stratejik, Penetapan pengukuran Kinerja, Pelaporan kinerja dan 4. Pemanfaatan informasi kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah (dokumen) Rp. 74.709.400 <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) Rp. 10.494.021.469</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Menyiapkan berkas usulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu (Laporan Bulanan) Rp. 10.494.021.469 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) Rp. 126.172.000 - Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Melaksanakan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya teralisasi (Stel) Rp. 126.172.000 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) 418.747.680 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Menyiapkan berkas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) Rp. 4.975.190 Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) 1.021.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Derwati Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) Rp. 1.531.500 Menyiapkan berkas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Mekarjaya Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) Rp. 1.972.500 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Menyiapkan berkas peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia (Jenis) Rp. 78.090.175 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Cpmokolan Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia (Jenis) Rp. 18.600.000 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Derwati Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia (Jenis) Rp. 23.455.500 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Manjahlega Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia (Jenis) Rp. 26.890.000 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Mekarjaya Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia (Jenis) Rp. 23.450.000 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Menyiapkan berkas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jenis) Rp. 8.503.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan 				



	<p>Cipamokolan Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jenis) Rp.861.300 Menyiapkan berkas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan DerwatiJumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jenis) Rp.4.437.700 Menyiapkan berkas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan ManjahlegaJumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jenis) Rp.3.166.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan MekarjayaJumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jenis) Rp.2.285.500</p> <ul style="list-style-type: none">- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor menyiapkan berkas penyediaan bahan logistik kantor Kecamatan Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman (%) Rp.33.166.870 Menyiapkan berkas penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Cipamokolan Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman (%)Rp.19.178.700 Menyiapkan berkas penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Derwati Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman (%)Rp.9.092.330 Menyiapkan berkas penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan ManjahlegaCakupan Penyediaan Makanan dan Minuman (%) Rp.11.714.500 Menyiapkan berkas penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Mekarjaya Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman (%) Rp.12.700.000- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan PengandaanMenyiapkan berkas Penyediaan barang cetakan dan pengandaan KecamatanJumlah Jenis Penyediaan Barang Cetakan (Jenis) Rp.26.184.160 Menyiapkan berkas Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Kelurahan Ciapmokolan Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetakan (Jenis) Rp. 1.100.000 Menyiapkan berkas Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Kelurahan Jenis Penyediaan Barang Cetakan (Jenis) Rp.4.982.060 Menyiapkan berkas Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Kelurahan MekarjayaJ umlah Jenis Penyediaan Barang Cetakan (Jenis) Rp.4.744.750- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Menyiapkan berkas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Kecamatan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan (Jenis) Rp.4.149.600 Menyiapkan berkas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Kelurahan Cipamokolan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan (Jenis) Rp.2.016.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Kelurahan DerwatiJ umlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan (Jenis) Rp.600.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Kelurahan Manjahlega Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan (Jenis) Rp.1.416.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Kelurahan MekarjayaJumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan (Jenis) Rp.2.436.000- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDMelaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai Surat PerintahCakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur (%)) Rp.86.027.345- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp.431.010.000 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) Rp.431.010.000- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) Rp.983.902.433- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikMenyiapkan berkas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Jasa Bulanan)
--	--



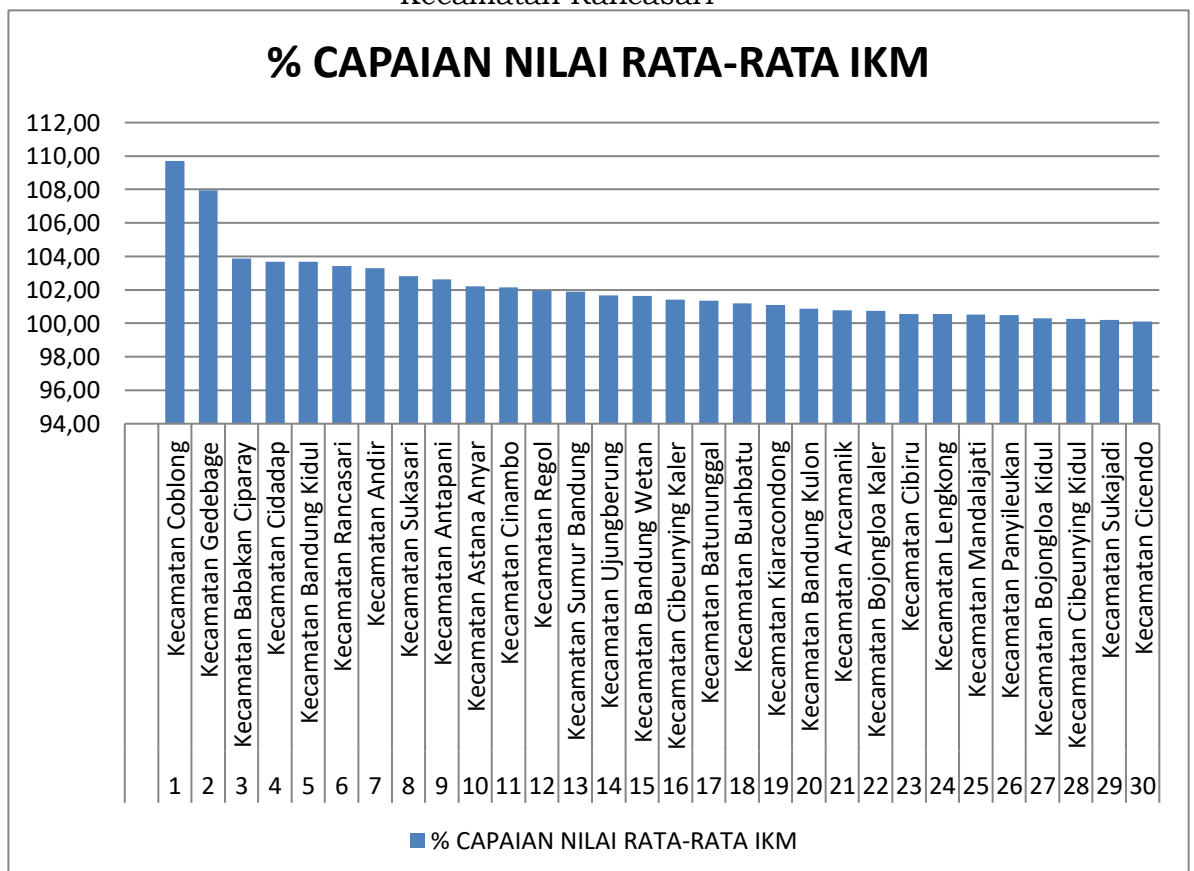
	<p>Rp.81.920.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Cipamokolan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Jasa Bulanan) Rp.18.000.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Derwati Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Jasa Bulanan) Rp.18.000.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan ManjahlegaJumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Jasa Bulanan) Rp.19.560.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Mekarjaya Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Jasa Bulanan) Rp.27.360.000</p> <ul style="list-style-type: none">- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Menyiapkan berkas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KecamatanJumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (jasaxbulan) Rp.718.800.433 Menyiapkan berkas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipamokolan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (jasaxbulan) Rp.30.666.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Derwati Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (jasaxbulan) Rp.21.916.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan ManjahlegaJumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (jasaxbulan) Rp.16.200.000 Menyiapkan berkas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan MekarjayaJumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (jasaxbulan) Rp.31.480.000- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) Rp.899.976.901- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanMelaksanakan pemeliharaan dan pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional KecamatanJumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional (Unit) Rp.251.412.400 Melaksanakan pemeliharaan dan pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional Kelurahan Cipamokolan Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional (Unit) Rp.39.777.000 Melaksanakan pemeliharaan dan pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional Kelurahan Derwati Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional (Unit) Rp.41.082.200 Melaksanakan pemeliharaan dan pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional Kelurahan ManjahlegaJumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional (Unit) Rp.33.029.201 Melaksanakan pemeliharaan dan pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional Kelurahan Mekarjaya Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional (Unit) Rp.41.458.000- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya/Pemeliharaan Gedung Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit) Rp.232.582.450 Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor Kelurahan CipamokolanJumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit) Rp.198.277.200 Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor Kelurahan MekarjayaJumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit) Rp.15.089.250- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya/Pemeliharaan peralatan kerja Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor di KecamatanJumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit) Rp.36.609.200 Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor di Kecamatan di Kelurahan CipamokolanJumlah
--	--



	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit) Rp.3.320.000 Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor di Kecamatan di Kelurahan DerwatiJumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit) Rp.5.840.000 Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor di Kecamatan di Kelurahan MekarjayaJumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit) Rp.1.500.000 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari Persentase Kelurahan Unggul</p>
Faktor pendukung	<p>Faktor pendukung tercapainya kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik KecamatanRancasari pada indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari adalah keterbukaan informasi layanan kepada masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yaitu tidak adanya biaya (gratis) pada pelayanan publik kepada masyarakat, kemudahan dalam prosedur pengurusan dalam pelayanan publik, kemampuan petugas pelayanan dalam melayani warga masyarakat</p>
Faktor Penghambat	-
Solusi	<p>Solusi dari permasalahan yang ada tersebut, diantaranya : Pemerintah Kota Bandung senantiasa mengeluarkan kebijakan yang dinamis, kebijakan yang dikeluarkan senantiasa menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat Perlu adanya inovasi pelayanan publik secara digital agar mengurangi kerumunan pada pelayanan publik masyarakat</p>

Grafik. 3

Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Rancasari





Dari grafik Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari masuk dalam urutan nomor 6 dari 30 Kecamatan dengan capaian Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari mencapai 103,43%.

Sasaran 4

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	75	100	133.33	75	100	133.33	75	100	133.33	100	100	100.00

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator	Isu keadilan dalam pembangunan kewilayahan, selalu menjadi perbincangan hangat, terutama terkait dengan masalah kesenjangan wilayah (regional imbalances). Untuk itu dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan kewilayahan maka perlu meningkatkan peran para pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Terdapat dua fokus dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan yaitu peningkatan peran kelembagaan dan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani, untuk itu perlu membangun kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi yang muncul di tengah masyarakat kewilayahan. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Kecamatan Rancasari dengan Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintahan yang akuntabel untuk mewujudkan 1 (satu) misi ke-2 Kota Bandung yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih adalah Meningkatkan Kepuasan Masyarakat. Sasaran Kecamatan Rancasari Kota Bandung adalah Meningkatkan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul Kelurahan Unggul merupakan model untuk meningkatkan mutu dan kinerja kelurahan dengan memaksimalkan pembinaan dan keterlibatan dari unsur seksi yang ada ditingkat kecamatan sehingga perkembangannya diharapkan akan lebih
--	---



	cepat terwujud dan terarah dalam mendukung program Pemerintahan Kota Bandung yang pada akhir dapat dijadikan menjadi kelurahan percontohan. Cara Pengukuran % kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul
Instrumen atau cara pengukuran Indikator	<p>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi / melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca Memiliki koleksi buku dange; 30 expKoran2 / majalah langganan kelurahan Ada laporan pengunjung 2. Septic Tank Komunal (Ekbang) Minimal untuk 5 rumah Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga Menggunakan pipa paralon Menggunakan bak control 3. Bank sampah per kelurahan (Ekbang) Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan 4. (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang) Anggota Koperasi dange; 20 orang Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas Memiliki Akte Pendirian Ada usaha simpan pinjam 5. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) Ada Pengurus Ada Anggota Ada AD/ART 6. Memiliki data anak Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA 7. Monitoring dan evaluasi Septic Tank Komunal (Ekbang) Minimal untuk 5 rumah Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga Menggunakan pipa paralon Menggunakan bak control Bank sampah per kelurahan (Ekbang) 8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang) Anggota Koperasi dange; 20 orang Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas Memiliki Akte Pendirian Ada usaha simpan pinjam 9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) Ada Pengurus Ada Anggota Ada AD/ART 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)
Kinerja nyata dengan Rencana	Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 4 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan
Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya	Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul " tahun ini menurun 33.33 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 133.33
Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan	Tahun 4 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Rancasari maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.
Kinerja nyata dengan target akhir Renstra	capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Rancasari maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

**Perbandingan
kinerja dengan
kinerja instansi
lainnya**

Bila dibandingkan dengan 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung maka capaian Prosentase Kelurahan Unggul Kecamatan Rancasari Tahun 2022 cukup baik

**PERBANDINGAN DATA IKU PERSENTASE KELURAHAN UNGGUL
KECAMATAN SE KOTA BANDUNG TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN UNGGUL		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Kecamatan Andir	50,00	100,00	200,00
2	Kecamatan Antapani	75,00	100,00	133,33
3	Kecamatan Bandung Kulon	75,00	100,00	133,33
4	Kecamatan Cibiru	75,00	100,00	133,33
5	Kecamatan Sukasari	75,00	100,00	133,33
6	Kecamatan Sumur Bandung	75,00	100,00	133,33
7	Kecamatan Ujungberung	80,00	100,00	125,00
8	Kecamatan Astana Anyar	83,00	100,00	120,48
9	Kecamatan Bandung Kidul	75,00	80,00	106,67
10	Kecamatan Batununggal	75,00	78,31	104,41
11	Kecamatan Rancasari	100,00	100,00	100,00
12	Kecamatan Bandung Wetan	100,00	100,00	100,00
13	Kecamatan Bojongloa Kaler	100,00	100,00	100,00
14	Kecamatan Cibeunying Kaler	100,00	100,00	100,00
15	Kecamatan Cicendo	100,00	100,00	100,00
16	Kecamatan Cinambo	100,00	100,00	100,00
17	Kecamatan Gedebage	100,00	100,00	100,00
18	Kecamatan Lengkong	100,00	100,00	100,00
19	Kecamatan Panyileukan	100,00	100,00	100,00
20	Kecamatan Babakan Ciparay	83,33	83,33	100,00
21	Kecamatan Bojongloa Kidul	83,33	83,33	100,00
22	Kecamatan Kiaracondong	83,33	83,33	100,00
23	Kecamatan Sukajadi	80,00	80,00	100,00
24	Kecamatan Arcamanik	75,00	75,00	100,00
25	Kecamatan Mandalajati	75,00	75,00	100,00
26	Kecamatan Buahbatu	75,00	75,00	100,00
27	Kecamatan Coblong	70,97	70,97	100,00
28	Kecamatan Cibeunying Kidul	66,67	66,67	100,00
29	Kecamatan Cidadap	66,66	66,66	100,00
30	Kecamatan Regol	57,14	57,14	100,00

**Output
program/kegiatan
dan keuangan**

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan Unggul (Persen) 3.483.750.020
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Laporan RT RW tepat waktu (Persen) 1.577.450.000
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat



	<p>Kecamatan Pembinaan RT RW Melaksanakan evaluasi Laporan RT RW se Kecamatan Jumlah Laporan RT RW tepat waktu (Laporan) 9.050.000</p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Pembinaan RT RW Melaksanakan evaluasi Laporan RT RW se Kelurahan Cipamokolan Jumlah Laporan RT RW tepat waktu (Laporan) 424.800.000- Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Pembinaan RT RW Melaksanakan evaluasi Laporan RT RW se Kelurahan Derwati Jumlah Laporan RT RW tepat waktu (Laporan) 380.400.000- Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Pembinaan RT RW Melaksanakan evaluasi Laporan RT RW se Kelurahan Manjahlega Jumlah Laporan RT RW tepat waktu (Laporan) 441.600.000- Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Pembinaan RT RW Melaksanakan evaluasi Laporan RT RW se Kelurahan Mekarjaya Jumlah Laporan RT RW tepat waktu (Laporan) 321.600.000 <p>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP (Persen) 429.720.000</p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Melaksanakan pelayanan kependudukan sesuai SOP di Kecamatan Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP (Jenis Pelayanan) 21.520.000- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Melaksanakan pelayanan kependudukan sesuai SOP Melaksanakan pelayanan kependudukan sesuai SOP di Kelurahan Cipamokolan Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP (Jenis Pelayanan) 105.000.000- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Melaksanakan pelayanan kependudukan sesuai SOP di Kelurahan Derwati Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP (Jenis Pelayanan) 107.200.000- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Melaksanakan pelayanan kependudukan sesuai SOP di Kelurahan Manjahlega Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP (Jenis
--	---



	<p>Pelayanan) 91.000.000</p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Melaksanakan peyeyanan kependudukan sesuai SOP di Kelurahan Mekarjaya Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP (Jenis Pelayanan) 105.000.000 <p>3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik (Persen) 1.106.814.020</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Melaksanakan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum se Kecamatan Panjang Jalan dan Drainase Terpelihara (Meter) 148.380.200- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Melaksanakan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum se kelurahan Cipamokolan Melaksanakan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kelurahan Cipamokolan Panjang Jalan dan Drainase Terpelihara (Meter) 180.000.000- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Melaksanakan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum se kelurahan Derwati Melaksanakan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kelurahan Derwati Panjang Jalan dan Drainase Terpelihara (Meter) 177.909.820- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Melaksanakan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum se kelurahan Manjahlega Melaksanakan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kelurahan Manjahlega Panjang Jalan dan Drainase Terpelihara (Meter) 360.524.000- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Melaksanakan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum se kelurahan Mekarjaya Melaksanakan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mekarjaya Panjang Jalan dan Drainase Terpelihara (Meter) 240.000.000 <p>4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada</p>
--	---



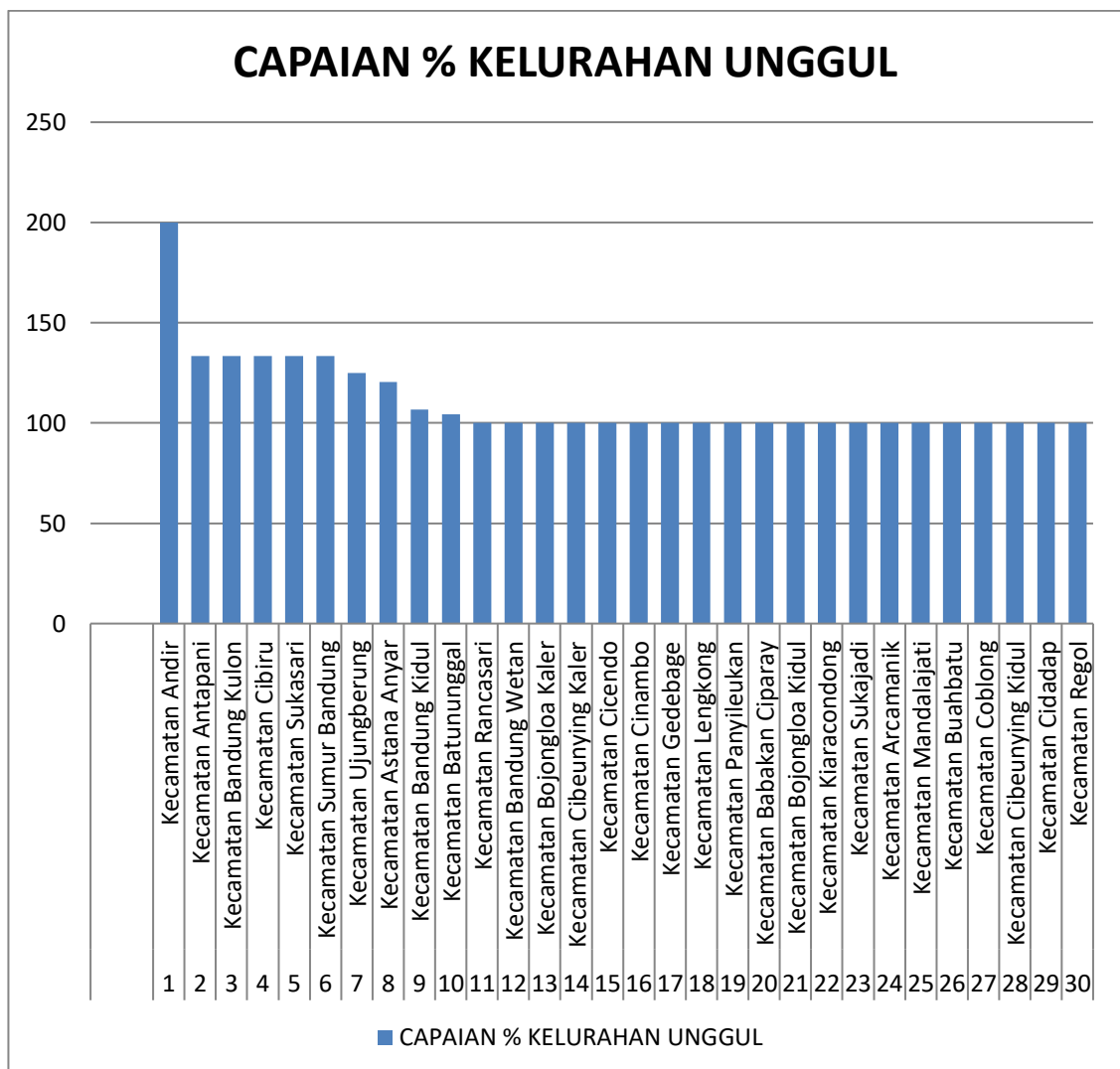
	<p>Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial (Persen) 369.766.000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di bidang kesejahteraan social se Kecamatan Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan) 22.010.000 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di bidang kesejahteraan social se Kelurahan Cipamokolan Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan) 72.000.000 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di bidang kesejahteraan social se Kelurahan Derwati Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan) 90.000.000 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di bidang kesejahteraan sosial se Kelurahan Manjehlega Jumlah dan #160; Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan) 104.156.000 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di bidang kesejahteraan social se Kelurahan Mekarjaya Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan) 81.600.000 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Rancasari Persentase lembaga kemasyarakatan unggul
Faktor pendukung	Faktor Pendukung : 1. Terasilitasnya kegiatan-kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diakomodir dalam Program Inovasi Pembangunan dann Pemberdayaan Kewilayahan 2. Tingginya



	partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan lingkup lembaga kemasyarakatan 3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan lembaga kemasyarakatan
Faktor Penghambat	-
Solusi	solusi, dari permasalahan yang ada tersebut, diantaranya :Pemerintah Kota Bandung senantiasa mengeluarkan kebijakan yang dinamis, kebijakan yang dikeluarkan senantiasa menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat;Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam sosialisasi protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

Grafik. 4

Perbandingan Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Rancasari Tahun 2022





Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Rancasari Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2022 dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. **24.974.299.403,00** dengan realisasi sebesar Rp. **24.049.456.107,00** atau sebesar **96,30%** dengan realisasi rincian tiap sasaran sebagai berikut :

1. Untuk sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari (Persentase siskamling RW Aktif) di Kecamatan Rancasari adalah sebesar Rp. **1.161.600.100.00** dan terealisasi sebesar Rp. **1.148.420.790.00** atau dengan serapan dana APBD untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Rancasari mencapai 98,87 %.
2. Untuk sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Rancasari (Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul) adalah sebesar Rp. **6.900.000.000.00** dan terealisasi sebesar Rp. **6.652.501.736.00** atau dengan serapan dana APBD untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Rancasari mencapai 96,41 %.
3. Untuk sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari (Persentase Kelurahan Unggul) adalah sebesar Rp. **3.483.750.020.00** dan terealisasi sebesar Rp. **3.419.088.448.00** atau dengan serapan dana APBD untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Rancasari mencapai 98,14 %.
4. Untuk sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari) adalah sebesar Rp. **13.428.539.883.00** dan terealisasi sebesar Rp. **12.829.445.133.00** atau dengan serapan dana APBD untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Rancasari mencapai 95,54 %.
5. Secara umum efektifitas anggaran terhadap sasaran Kecamatan rancasari Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian sasaran kinerja. Dengan rata-rata persentase realisasi anggaran terhadap pagu indikatif dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Kecamatan Rancasari

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran Tahun 2022	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat											
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
1.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1.161.600.100.00	205.229.200.00	17.67	460.691.170.00	39.66	742.078.810.00	63.88	1.148.420.790.00	98.87
	1.1.1	<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	1.161.600.100.00	205.229.200.00	17.67	460.691.170.00	39.66	742.078.810.00	63.88	1.148.420.790.00	98.87
Total Per Sasaran			1.161.600.100.00	205.229.200.00	17.67	460.691.170.00	39.66	742.078.810.00	63.88	1.148.420.790.00	98.87
Sasaran 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan											
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		6.715.535.900.00	454.996.500.00	6.78	2.947.691.212.00	43.89	5.077.129.483.00	75.6	6.474.083.846.00	96.4
	2.1.1	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	23.535.900.00	22.018.150.00	93.55	22.018.150.00	93.55	22.018.150.00	93.55	22.018.150.00	93.55
	2.1.2	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	5.492.000.000.00	328.625.550.00	5.98	2.638.489.026.00	48.04	4.345.823.497.00	79.13	5.324.817.802.00	96.96
	2.1.3	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	1.200.000.000.00	104.352.800.00	8.7	287.184.036.00	23.93	709.287.836.00	59.11	1.127.247.894.00	93.94
2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		184.873.500.00	14.108.000.00	7.63	80.329.550.00	43.45	139.190.150.00	75.29	178.417.890.00	96.51
	2.2.1	<i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	164.256.000.00	12.425.000.00	7.56	70.159.700.00	42.71	124.174.150.00	75.6	160.231.890.00	97.55
	2.2.2	<i>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	20.617.500.00	1.683.000.00	8.16	10.169.850.00	49.33	15.016.000.00	72.83	18.186.000.00	88.21
Total Per Sasaran			6.900.409.400.00	469.104.500.00	6.80	3.028.020.762.00	43.88	5.216.319.633.00	75.59	6.652.501.736.00	96.41



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari											
3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		74.709.400.00	0.00	0	0.00	0	73.803.212.00	98.79	73.803.212.00	98.79
	3.1.1	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	74.709.400.00	0.00	0	0.00	0	73.803.212.00	98.79	73.803.212.00	98.79
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.494.021.469.00	2.088.000.848.00	19.9	4.759.598.355.00	45.36	7.340.777.281.00	69.95	10.025.875.119.00	95.54
	3.2.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	10.494.021.469.00	2.088.000.848.00	19.9	4.759.598.355.00	45.36	7.340.777.281.00	69.95	10.025.875.119.00	95.54
3.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		126.172.000.00	0.00	0	78.883.260.00	62.52	78.883.260.00	62.52	119.306.130.00	94.56
	3.3.1	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	126.172.000.00	0.00	0	78.883.260.00	62.52	78.883.260.00	62.52	119.306.130.00	94.56
3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		418.747.680.00	27.667.820.00	6.61	134.366.604.00	32.09	236.899.722.00	56.57	390.329.135.00	93.21
	3.4.1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	9.500.190.00	1.739.000.00	18.3	2.180.000.00	22.95	5.092.500.00	53.6	9.438.000.00	99.35
	3.4.2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	170.485.675.00	6.601.770.00	3.87	71.419.474.00	41.89	114.290.352.00	67.04	168.369.299.00	98.76
	3.4.3	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	19.253.500.00	2.852.800.00	14.82	5.912.700.00	30.71	10.460.200.00	54.33	15.166.100.00	78.77
	3.4.4	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	85.852.400.00	11.336.250.00	13.2	31.221.680.00	36.37	40.959.180.00	47.71	71.215.380.00	82.95
	3.4.5	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	37.010.970.00	3.246.500.00	8.77	19.242.250.00	51.99	23.640.990.00	63.88	35.962.860.00	97.17
	3.4.6	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	10.617.600.00	1.891.500.00	17.81	4.390.500.00	41.35	7.016.500.00	66.08	9.850.000.00	92.77
	3.4.7	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	86.027.345.00	0.00	0	0.00	0	35.440.000.00	41.2	80.327.496.00	93.37
3.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		983.902.433.00	169.188.000.00	17.2	412.518.000.00	41.93	656.925.250.00	66.77	978.328.250.00	99.43
	3.5.1	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	164.840.000.00	30.888.000.00	18.74	67.488.000.00	40.94	109.030.250.00	66.14	159.308.250.00	96.64
	3.5.2	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	819.062.433.00	138.300.000.00	16.89	345.030.000.00	42.12	547.895.000.00	66.89	819.020.000.00	99.99
3.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		899.976.901.00	57.650.900.00	6.41	194.483.258.00	21.61	250.571.610.00	27.84	861.303.287.00	95.7



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

	3.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	406.758.801.00	57.650.900.00	14.17	154.759.208.00	38.05	180.873.108.00	44.47	383.761.008.00	94.35
	3.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	445.948.900.00	0.00	0	34.249.050.00	7.68	48.449.502.00	10.86	433.598.079.00	97.23
	3.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.269.200.00	0.00	0	5.475.000.00	11.58	21.249.000.00	44.95	43.944.200.00	92.97
3.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	431.010.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	380.500.000.00	88.28
	3.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	431.010.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	380.500.000.00	88.28
Total Per Sasaran			13.428.539.883.00	2.342.507.568.00	17.44	5.579.849.477.00	41.55	8.637.860.335.00	64.32	12.829.445.133.00	95.54
Sasaran 4 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan											
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
4.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1.577.450.000.00	261.400.000.00	16.57	594.196.600.00	37.67	1.015.056.600.00	64.35	1.575.146.600.00	99.85
	4.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.577.450.000.00	261.400.000.00	16.57	594.196.600.00	37.67	1.015.056.600.00	64.35	1.575.146.600.00	99.85
4.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		429.720.000.00	64.750.000.00	15.07	178.558.200.00	41.55	287.792.000.00	66.97	425.800.800.00	99.09
	4.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	429.720.000.00	64.750.000.00	15.07	178.558.200.00	41.55	287.792.000.00	66.97	425.800.800.00	99.09
4.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		1.106.814.020.00	186.471.250.00	16.85	439.252.250.00	39.69	712.712.398.00	64.39	1.053.782.998.00	95.21



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

		<i>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	1.106.814.020.00	186.471.250.00	16.85	439.252.250.00	39.69	712.712.398.00	64.39	1.053.782.998.00	95.21
4.4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	369.766.000.00	54.644.000.00	14.78	153.710.450.00	41.57	246.452.250.00	66.65	364.358.050.00	98.54
	4.4.1	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	369.766.000.00	54.644.000.00	14.78	153.710.450.00	41.57	246.452.250.00	66.65	364.358.050.00	98.54
Total Per Sasaran			3.483.750.020.00	567.265.250.00	16.28	1.365.717.500.00	39.20	2.262.013.248.00	64.93	3.419.088.448.00	98.14
Grand Total			24.974.299.403.00	3.584.106.518.00	14.35	10.434.278.909.00	41.78	16.858.272.026.00	67.50	24.049.456.107.00	96.30



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kecamatan Rancasari

Periode 2019 - 2023

Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1.1	Persentase Siskamling RW Aktif	%	75	84.62	112.83	1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.161.600.100	1.148.420.790	98.87
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					112.83	TOTAL PER SASARAN	1.161.600.100	1.148.420.790	98.87	
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 13.96 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 114.12 %												
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	2.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	78	90.60	116.15	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.900.409.400	6.652.501.736	96.41
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					116.15	TOTAL PER SASARAN	6.900.409.400	6.652.501.736	96.41	
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 19.74 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 120.48 %												
3	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	3.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	85.50	88.43	103.43	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.428.539.883	12.829.445.133	95.54
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					103.43	TOTAL PER SASARAN	13.428.539.883	12.829.445.133	95.54	
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 7.89 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 108.26 %												
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	4.1	Persentase Kelurahan Unggul	%	100	100	100.00	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.483.750.020	3.419.088.448	98.14
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100.00	TOTAL PER SASARAN	3.483.750.020	3.419.088.448	98.14	
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 1.86 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 101.89 %												
								TOTAL KESELURUHAN	24.974.299.403	24.049.456.107	96.30	



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Rancasari Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 4 Kecamatan Rancasari Kota Bandung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 4 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 112.83 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116.15 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103.43 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Rancasari Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 4 sebesar Rp. 24.974.299.403 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 24.049.456.107, dengan demikian dapat



dikatakan tahun 4 Kecamatan Rancasari Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 924.843.296

Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung 2018-2023 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 4, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 112.83 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116.15 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103.43 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Terkait dengan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal – hal Terkait Pencapaian Indikator Kinerja yang ada di Kecamatan Rancasari Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 terdiri atas 4 indikator. Dari kesemua indikator kinerja tersebut, 3 indikator capaian kinerjanya melebihi target dan 1 indikator berhasil. Hal ini dapat diartikan bahwa Kecamatan Rancasari berhasil dalam pelaksanaan kinerja pada Tahun 2022 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari komitmen Kecamatan Rancasari dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022, dimana semuanya telah berdasarkan pada basis kinerja, artinya seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah jelas kinerjanya yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rancasari sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 24.974.299.403 (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Rancasari Kota Bandung adalah 96.30 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Rancasari Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar



lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Meskipun demikian, untuk mencapai pada pencapaian tersebut, diperlukan kerja ekstra dari berbagai pihak dimana permasalahan bukan hanya timbul dari faktor internal namun juga berasal dari faktor eksternal mengingat tugas Kecamatan Rancasari berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut: :

- a. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan simultan sebagai upaya untukantisipasi dan pemecahan masalah atau hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi
- c. Memperkuat koordinasi, sinergi dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesamaan persepsi dan gerak dalam menjalankan visi dan misi instansi
- d. Diperlukan Perluasan dan sarana prasarana Ruang Pelayanan untuk memberika suasana lebih nyaman kepada masyarakat pengguna layanan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rancasari Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Rancasari Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 18 Januari 2022

CAMAT RANCASARI



Drs. H. HAMDANI, M.M
NIP. 19670808 198910 1 001



L A M P I R A N – L A M P I R A N



PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN RANCASARI TAHUN 2022



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**

KECAMATAN RANCASARI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. HAMDANI, M.M.**
Jabatan : **CAMAT RANCASARI**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **H. YANA MULYANA, S.E., M.M.**
Jabatan : **WALI KOTA BANDUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 1 November 2022

PIHAK KEDUA

H. YANA MULYANA, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA

Drs. H. HAMDANI, M.M.
NIP. 19670806 198910 1 001



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RANCASARI
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Rancasari	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persen	78
		Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terrealisasi	Kegiatan	254
2.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Rancasari	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	75
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	85,50



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RANCASARI
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TRIWULANAN			
				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Rancasari	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persen	-	-	-	78
		Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terrealisasi	Kegiatan	51	105	170	254
2.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Rancasari	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	-	-	-	75
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	-	-	-	100
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	85,50	85,50	85,50	85,50



No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 6.900.400.400	APBD Perubahan Kota Bandung Tahun 2022
2.	Program: Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Rp. 1.161.600.100	APBD Perubahan Kota Bandung Tahun 2022
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 3.483.750.020	APBD Perubahan Kota Bandung Tahun 2022
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 13.428.529.883	APBD Perubahan Kota Bandung Tahun 2022
TOTAL		Rp. 24.974.229.403	

Bandung, 1 November 2022

PIHAK KEDUA

H. YANA MULYANA, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA

Dra. H. HANDANI, M.M.
NIP. 19670806 198910 1 001



Kecamatan Rancasari

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN RANCASARI**

Jl. Santosa Asih No. 17 Telp (022) 7562918 Bandung 40292
email : Rancasari.bandung.go.id

KEPUTUSAN

CAMAT RANCASARI

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG
TAHUN 2022**

CAMAT RANCASARI

KOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Rancasari Kota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat Rancasari Kota Bandung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Kecamatan Rancasari Kota Bandung;



- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Rancasari Kota Bandung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dana anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



Drs. H. HAMDANI, M.M.
NIP. 19670806 198910 1 001



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN RANCASARI**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD Kriteria: 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung / bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							29. Ada encana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang 33. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari	Persentase siskamling RW Aktif	%	Merupakan Pelimpahan Kewenangan	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungja wab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kriteria Siskamling Aktif : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari	Persentase Kelurahan Unggul	%		Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungja wab semua Kasi di Kecamatan	Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi / melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini : 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung -



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an), 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - Satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 6. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) 7.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi
							6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak control 7. Kegiatan KangPisman, memenuhi salah satu atau lebih dari : <ul style="list-style-type: none"> - Bank Sampah - Pemilahan Sampah - Pemanfaatan Sampah 8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

							<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi ≥ 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)

CAMAT RANCASARI



Drs. H. HAMDANI, M.M.
NIP. 19670808 198910 1 001



Penghargaan-Penghargaan





PRESTASI KECAMATAN RANCASARI TAHUN 2020

NO	JENIS PENGHARGAAN/PRESTASI	TINGKAT	HASIL YANG DICAPAI	TAHUN	PEYELENGGARA	KET
2	Pengisian survei UKM	Kota Bandung	4 Kecamatan terespon	2020	Bappelitbang, Unpad	Seksi Ekbang
3	Lomba Aktivasi Co Working Space	Kota Bandung	4 Kecamatan Terbaik	2020	Disbudpar Kota Bandung	Seksi Ekbang
4	Lomba ODF 100%	Kota Bandung	2 Kecamatan Terbaik	2020	Dinkes Kota Bandung	Seksi Ekbang
5	Lomba Proklim	Nasional	Juara Utama dan Madya	2020	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Seksi Ekbang
6	MTQ	Kota Bandung	Juara I	2020	Kesra Kota Bandung	Seksi Kesos
7	Hafidz Qur'an	Kota Bandung	Juara I dan Juara III	2020	Kesra Kota Bandung	Seksi Kesos
8	Perlombaan 5 Jenis Lomba TP PKK Kota Bandung	Kota Bandung	Juara II	2020	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
9	IVA Test	Kota Bandung	Juara I	2020	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
10	UP2K	Kota Bandung	Juara I	2020	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
11	Hatinya PKK	Kota Bandung	Juara II	2020	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
12	Tertib Administrasi PKK	Kota Bandung	Juara III	2020	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
13	Juara Yel-yel PKK dalam Sosialisasi PAAR	Kota Bandung	Juara I	2020	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
14	Kelurahan 100% ODF	Kota Bandung	100%	2020	Pemkot Bandung	Kelurahan Cipamokolan
15	Kinerja Lurah (SIP)	Kota Bandung	Pringkat ke 5	2020	Pemkot Bandung	Kelurahan Derwati
16	Perlombaan 5 Jenis Lomba TP PKK Kota Bandung	Kota Bandung	Harapan III	2020	PKK Kota Bandung	Kelurahan Derwati
17	Kelurahan Sadar Hukum (KADARKUM)	Jawa Barat	Juara I	2020	Kemenkumham Provinsi Jabar	Kelurahan Derwati
18	Kelurahan ODF 100%	Kota Bandung	100%	2020	Pemkot Bandung	Kelurahan Derwati
19	Perlombaan 5 Jenis Lomba TP PKK Kota Bandung	Kota Bandung	Juara II	2020	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
20	IVA Test	Kota Bandung	Juara I	2020	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
21	UP2K	Kota Bandung	Juara I	2020	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
22	Hatinya PKK	Kota Bandung	Juara II	2020	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
23	Tertib Administrasi PKK	Kota Bandung	Juara III	2020	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
24	Juara Yel-yel PKK dalam Sosialisasi PAAR	Kota Bandung	Juara I	2020	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya



PRESTASI KECAMATAN RANCASARI TAHUN 2021

NO	JENIS PENGHARGAAN/PRESTASI	TINGKAT	HASIL YANG DICAPAI	TAHUN	PEYELENGGARA	KET
1	Lomba Video Kegiatan Word Cleanup Day	Kota Bandung	5 Kecamatan Terbaik	2021	DLH Kota Bandung	Seksi Ekbang
2	Lomba Video Pelaksanaan Bandung Menanam Jilid III	Kota Bandung	Juara 1	2021	DKPP Kota Bandung	Seksi Ekbang
3	Lomba Jingle PAAR TP PKK tingkat Kota Bandung	Kota Bandung	Juara Harapan III	2021	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
4	Forum WPA Kecamatan Rancasari ter-Inovatif dalam program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS di Kota Bandung	Kota Bandung	Penghargaan	2021	WPA Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
5	Care Creative Content WPA	Kota Bandung	Penghargaan	2021	WPA Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
6	Kelurahan Bersinar	Kota Bandung	-	2021	Pemkot Bandung	Kelurahan Derwati
7	Eco Office	Kota Bandung	-	2021	Pemkot Bandung	Kelurahan Derwati
8	Jawara I Rampak Dewasa	Kota Bandung	Juara I	2021	DISBUDPAR KOTA BANDUNG	Kel Manjahlega
9	Lomba Jingle PAAR TP PKK tingkat Kota Bandung	Kota Bandung	Juara Harapan III	2021	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
10	Forum WPA Kecamatan Rancasari ter-Inovatif dalam program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS di Kota Bandung	Kota Bandung	Penghargaan	2021	WPA Kota Bandung	Kel Mekarjaya
11	Care Creative Content WPA	Kota Bandung	Penghargaan	2021	WPA Kota Bandung	Kel Mekarjaya
12	Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK Bangsa Kencana Kesehatan	Kota Bandung	Juara II	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya



PRESTASI KECAMATAN RANCASARI TAHUN 2022

NO	JENIS PENGHARGAAN/PRESTASI	TINGKAT	HASIL YANG DICAPAI	TAHUN	PEYELENGGARA	KET
1	Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan	Kota Bandung	Juara II	2022	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
2	Pelaksana Terbaik 5 Lomba 10 Program Pokok Pkk	Kota Bandung	Juara II	2022	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
3	Juara Tertib Administrasi PKK	Kota Bandung	Juara Harapan I	2022	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
4	Juara Pola Asuh Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang (PAAR)	Kota Bandung	Juara Harapan III	2022	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
5	Juara UP2K-PKK	Kota Bandung	Juara II	2022	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
6	Juara Hatinya PKK	Kota Bandung	Juara III	2022	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
7	Juara Iva Test	Kota Bandung	Juara Harapan II	2022	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
8	Pelaksana terbaik Lomba PAAREDI	Kota Bandung	Juara Harapan III	2022	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
9	Kader PKK Terbaik	Kota Bandung	Terbaik ke-4	2022	TP PKK Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
10	Senam Kreasi	Kota Bandung	Juara III	2022	Perwosi Kota Bandung	Seksi Pemberdayaan
11	Lomba Tiktok PHBS	Prov. Jawa Barat	Juara Like Terbanyak	2022	Prov. Jawa Barat	Kelurahan Cipamokolan
12	Lomba Kader Dasawisma PKK	Kota Bandung	Juara Harapan 1	2022	PKK Kota Bandung	Kelurahan Cipamokolan
13	Lomba Pengelolaan Up2K	Kecamatan	Juara 1	2022	Kecamatan Rancasari	Kelurahan Cipamokolan
14	Lomba Cipta Menu	Kecamatan	Juara 2	2022	Kecamatan Rancasari	Kelurahan Cipamokolan
15	Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan	Kota Bandung	Juara II	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
16	Pelaksana Terbaik 5 Lomba 10 Program Pokok Pkk	Kota Bandung	Juara II	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
17	Juara Tertib Administrasi PKK	Kota Bandung	Juara Harapan I	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
18	Juara Pola Asuh Anak Penuh	Kota	Juara	2022	TP PKK Kota	Kel



	Cinta Dan Kasih Sayang (PAAR)	Bandung	Harapan III		Bandung	Mekarjaya
19	Juara UP2K-PKK	Kota Bandung	Juara II	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
20	Juara Hatinya PKK	Kota Bandung	Juara III	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
21	Juara Iva Test	Kota Bandung	Juara Harapan II	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
22	lomba PMT kudapan	Tk. Kecamatan	Juara I	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
23	Lomba Kader tanggap wilayah Stunting/Katawis (eta tiingkat kecamatan) yel2	Tk. Kecamatan	Juara I	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
24	Lomba Kader tanggap wilayah Stunting/Katawis (eta tiingkat kecamatan)	Tk. Kecamatan	Juara II	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
25	lomba UP2 K	Tk. Kecamatan	Juara III	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
26	craft kader	Tk. Kecamatan	Juara II	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
27	UMKM kuliner	Tk. Kecamatan	Juara II	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
28	Lomba kader BIAN	Tk. Kecamatan	Juara I	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
29	Lomba duta Cerita	Tk. Kecamatan	Juara III	2022	TP PKK Kota Bandung	Kel Mekarjaya
30	Senam Kreasi Kategori Aerobik Perorangan	Kota Bandung	Juara II	2022	Perwosi Kota Bandung	Kasi Pemberdayaan
31	Lomba Kreasi Kerajinan Tangan UP2K	Kota Bandung	Juara I	2022	TP PKK Kota Bandung	Kasi Pemberdayaan
32	Lomba Pemanfaatan Pakaian Bekas Menjadi Kebaya Klasik atau Modern	Kota Bandung	Juara Harapan I	2022	TP PKK Kota Bandung	Kasi Pemberdayaan
33	Lomba Foto Ibu dan Anak dalam Rangka Hari Ibu	Kota Bandung	Juara II	2022	TP PKK Kota Bandung	Kasi Pemberdayaan
34	ASN Berprestasi	Kota Bandung	Juara I	2022	BKPSDM Kota Bandung	Kasi Pemberdayaan
35	Kecamatan Layak Pemuda	Kota Bandung	Juara I	2022	Dispora Kota Bandung	Kasi Pemberdayaan



Evidence IKU Kecamatan Rancasari Tahun 2022

LAPORAN HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PADA
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RANCASARI

KOTA BANDUNG 2022

1. Indeks Per Unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut:

No.	UNSUR PELAYANAN	PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3.50
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2)	3.67
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3.58
4	Biaya/Tarif (U4)	4.00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3.33
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3.42
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3.42
8	Sarana dan Prasarana (U8)	3.42
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	3.50
10	Nilai Unsur Tertinggi	4.00
11	Nilai Unsur Terendah	3.33

Keterangan : Jumlah Responden sebanyak : 10 orang

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut: $(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11) = 3.47$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKM setelah dikonversi = 88,43
- Mutu Pelayanan = A
- Kinerja unit pelayanan adalah Baik

2. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

- Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : U5, U6, U7
- Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : U4, U2, U3
- Upaya untuk mempertahankan unsur pelayanan :
- Upaya untuk mempertahankan unsur pelayanan



Mengetahui :

Kecamatan RANCASARI

KECAMATAN
RANCASARI

Drs. H. Hamdani, M.M.

NIP. 8061989101001

Bandung, 30 Desember 2022

Penanggung Jawab

Finni Gantini Arif, SP., M.M.
NIP. 197112132010012001



LAMPIRAN I
PUBLIKASI IKM DI RUANG PELAYANAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

KECAMATAN RANCASARI

Kota Bandung

SEMESTER : 2 (TRIWULAN IV) TAHUN : 2022

NILAI IKM

88.43

RESPONDEN

Jumlah	: 12 Orang
Jenis Kelamin	: L = 8 Orang / P = 4 Orang
Pendidikan	: SD = 0
	SMP = 0
	SMA = 4
	D1/D2/D3 = 2
	S1 = 4
	S2 = 2
Survei Periode	: 2022

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN

MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari




**EVIDEN SASARAN
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN RANCASARI TAHUN 2022**

No	Uraian	Keterangan	Kriteria	Eviden/Bukti Dukung
1	<p>Kecamatan Rancasari Kegiatan Pelayanan terhadap masyarakat terhadap berbagai pelayanan administrasi pemerintahan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Mudah 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur mudah dan cepat 3. Waktu Penyelesaian cepat 4. Biaya/Tarif gratis 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan apa saja 6. Kompetensi Pelaksana (sdm Pelayanan seperti apa) 7. Perilaku Pelaksana (sdm Pelayanan ramah) 8. Sarana dan Prasarana (lengkap/kurang) 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (ada Pengaduan cepat ditangani) 	<p>Dalam Pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di kelurahan cipamokolan selalu menerapkan budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), dengan menjelaskan persyaratan yang mudah, sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan, waktu penyelesaian cepat dan tanpa biaya (Gratis). Berdasarkan Hasil Survei Indeks</p>	<p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	<p>Eviden/Bukti Dukung</p> 



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

		<p>Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari pada bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan 88,43.</p>	 	
--	--	--	--	--



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari





**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**





Kecamatan Rancasari





**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

<p>2</p>	<p>Kelurahan Cipamokolan Kegiatan terhadap pelayanan pemerintahan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Mudah 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur mudah dan cepat 3. Waktu Penyelesaian cepat 4. Biaya/Tarif gratis 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan apa saja 6. Kompetensi Pelaksana (sdm Pelayanan seperti apa) 7. Perilaku Pelaksana (sdm Pelayanan ramah) 8. Sarana dan Prasarana (lengkap/kurang) 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (ada Pengaduan cepat ditangani) 	<p>Dalam Pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di kelurahan cipamokolan selalu menerapkan budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), dengan menjelaskan persyaratan yang mudah, sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan, waktu penyelesaian cepat dan tanpa biaya (Gratis). Berdasarkan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari</p>	<p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	 	 
----------	---	---	---	--	--



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022





pada bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan 88,43.





**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

<p>3</p>	<p>Kelurahan Derwati Kegiatan terhadap pelayanan pemerintahan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Mudah 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur mudah dan cepat 3. Waktu Penyelesaian cepat 4. Biaya/Tarif gratis 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan apa saja 6. Kompetensi Pelaksana (sdm Pelayanan seperti apa) 7. Perilaku Pelaksana (sdm Pelayanan ramah) 8. Sarana dan Prasarana (lengkap/kurang) 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (ada Pengaduan cepat ditangani) 	<p>Dalam Pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di kelurahan cipamokolan selalu menerapkan budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), dengan menjelaskan persyaratan yang mudah, sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan, waktu penyelesaian cepat dan tanpa biaya (Gratis). Berdasarkan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari</p>	<p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	 	 
----------	---	---	---	--	--



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

pada bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan 88,43.






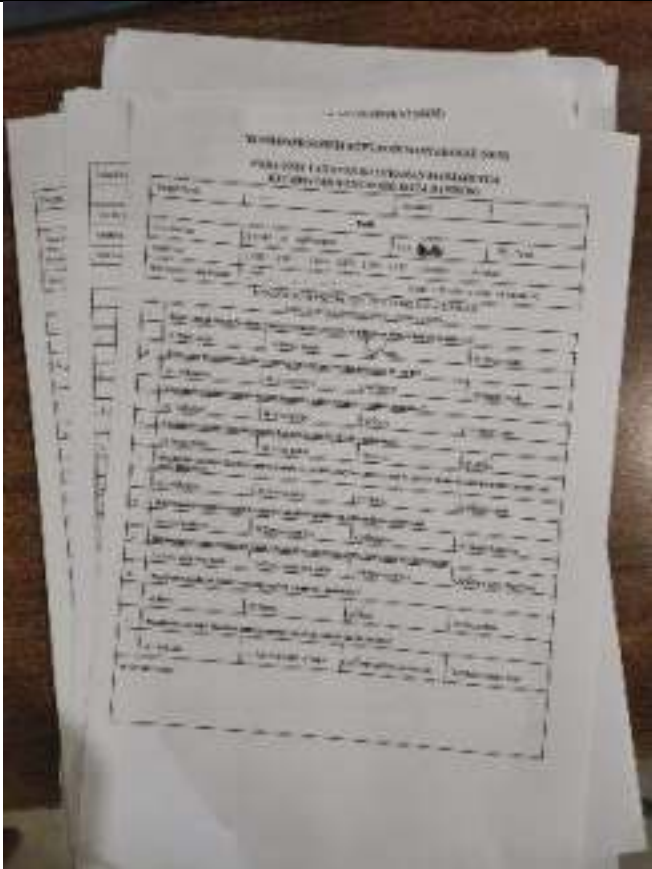
**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

<p>4</p>	<p>Kelurahan Manjahleg Kegiatan Pelayan terhadap masyarakat terhadap berbagai pelayanan administrasi pemerintahan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Persyaratan Mudah 11. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur mudah dan cepat 12. Waktu Penyelesaian cepat 13. Biaya/Tarif gratis 14. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan apa saja 15. Kompetensi Pelaksana (sdm Pelayanan seperti apa) 16. Perilaku Pelaksana (sdm Pelayanan ramah) 17. Sarana dan Prasarana (lengkap/kurang) 18. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (ada Pengaduan cepat ditangani) 	<p>Dalam Pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di kelurahan cipamokolan selalu menerapkan budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), dengan menjelaskan persyaratan yang mudah, sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan, waktu penyelesaian cepat dan tanpa biaya (Gratis). Berdasarkan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari</p>	<p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>		
----------	--	---	---	--	--



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

		<p>pada bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan 88,43.</p>			
--	--	--	--	---	--



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

5	<p>Kelurahan Mearjaya Kegiatan Pelayan terhadap masyarakat terhadap berbagai pelayanan administrasi pemerintahan, yaitu :</p> <p>19. Persyaratan Mudah 20. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur mudah dan cepat 21. Waktu Penyelesaian cepat 22. Biaya/Tarif gratis 23. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan apa saja 24. Kompetensi Pelaksana (sdm Pelayanan seperti apa) 25. Perilaku Pelaksana (sdm Pelayanan ramah) 26. Sarana dan Prasarana (lengkap/kurang) 27. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (ada Pengaduan cepat ditangani)</p>	<p>Dalam Pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di kelurahan cipamokolan selalu menerapkan budaya 5 S (Senyum, Sapa, Sopan dan Santun), dengan menjelaskan persyaratan yang mudah, sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan, waktu penyelesaian cepat dan tanpa biaya (Gratis). Berdasarkan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari pada bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022, jumlah nilai pada unit</p>	<p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>
---	--	---	---

LAPORAN HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA KELURAHAN MEARJAYA KECAMATAN RANCASARI KOTA MANENDE

BULAN OKTOBER s/d DESEMBER 2022

I. Indeks Per-Urus Pelayanan:

Kelurahan Mearjaya yang terdapat indeks kepuasan masyarakat terdiri atas pada unit pelayanan seperti jumlah nilai persentase setiap unsur pelayanan. Sebagai sumbu tolak tercapainya [tingkat] atau setiap unit pelayanan merupakan jumlah nilai persentase setiap unsur pelayanan dikalikan dengan persentase yang telah ditetapkan sebagai berikut:

NO	INDUKS PELAYANAN	NILAI INDEKS PELAYANAN (SKM)
1	Persyaratan Pelayanan	2,11
2	Prosedur Pelayanan	2,22
3	Waktu Pelayanan	2,27
4	Biaya/Tarif Pelayanan	2,22
5	Kompetensi Pelaksana	2,11
6	Perilaku Pelaksana	2,11
7	Sarana dan Prasarana	2,11
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,11
9	Kelembagaan	2,11

Keterangan : Jumlah Kepuasan rata-rata = 20,11

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan cara sebagai berikut:
 $IKM = \frac{1}{9} (2,11 + 2,22 + 2,27 + 2,22 + 2,11 + 2,11 + 2,11 + 2,11 + 2,11) = 2,11$

Sebagai gambaran nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat di gambarkan sebagai berikut :

- Nilai IKM rendah < 2,0000 = B
- Nilai IKM rata-rata = 2,0000 = A
- Nilai IKM tinggi > 2,0000 = Sangat Baik

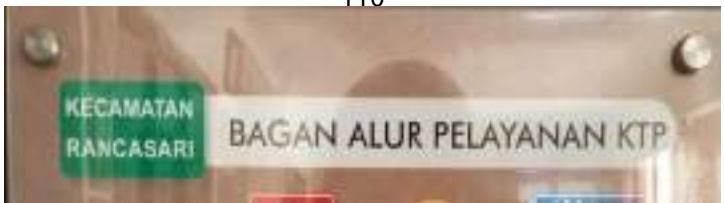
II. Prioritas Perbaikan Kualitas Pelayanan:

Terdapat permasalahan kualitas pelayanan di perioritaskan pada unsur yang memperoleh nilai paling rendah, sehingga unsur yang memperoleh nilai paling tinggi tetap tetap dipertahankan.

- Nilai dalam kategori paling rendah yang harus dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : **Kompetensi Pelaksana**
- Nilai dalam kategori paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : **Kelembagaan dan Kelembagaan Percepatan dan Penanganan Pengaduan**

Rancasari, 30 Desember 2022
 Kepala Kelurahan Mearjaya
 AIN WAHMAD HIDAYAT, S.P
 NIP. 1970543 200312 1 001

Kepala Desa Mearjaya
 INA KRIPINDA, S.P
 NIP. 1970418 199005 2 007





**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

Kecamatan Rancasari

EVIDEN SASARAN
REKAPITULASI PENCAPAIAN PROSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN UNGGUL 2022

NO	LKK	Jumlah Sub sub Kegiatan di DPA Pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																							Jumlah sub sub kegiatan yang terkait dengan RPJMD	Persentase	KRITERIA	
			1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	2. Urban Farming	3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)	4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang	5. Penanaman Pohon	6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air	8. Perbaikan/pemeliharaan gedung / bale RW	9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif	10. Sosialisasi Urban Farming	11. Sosialisasi ODF	12. Taman Tematik ramah disabilitas	13. Bandung Tanginas	14. Penguatan Kelembagaan	15. Kelompok Lansia Sehat	16. Fasilitasi posyandu lingkup RW	17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK	18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga	19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK	20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah	21. Pembinaan Posyandu	22. Ada encana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA	23. Melakukan pelatihan UEP	24. Pendataan PMKS dan PSKS	25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN	26. Event Olah Raga	27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)	28. Ada encana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM	29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)	30. Pendataan Profil Kelurahan	31. Rembug Warga/Pra Musrenbang				32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	RW 01	5						1										1															1	1	4	80,00%	UNGGUL
2	RW 02	4							1									1															1	1	4	100,00%	UNGGUL
3	RW 03	4								1								1															1	1	4	100,00%	UNGGUL
4	RW 04	2							1									1															1	1	4	200,00%	UNGGUL



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

Kecamatan Rancasari

5	RW 05	4						1	1																											1	1	5	125,00%	UNGGUL																								
6	RW 06	2							1																													1	1	4	200,00%	UNGGUL																						
7	RW 07	7																																						1	1	3	42,86%	TIDAKUNGGUL																				
8	RW 08	4						1	1																															1	1	5	125,00%	UNGGUL																				
9	RW 09	6								1																																1	1	4	66,67%	TIDAKUNGGUL																		
10	RW 10	2						1																																			1	1	4	200,00%	UNGGUL																	
11	RW 11	5																																										1	1	3	60,00%	TIDAKUNGGUL																
12	RW 12	2						1																																					1	1	4	200,00%	UNGGUL															
1	PKK	11		1	1	1	1	1	1																																							1						9	81,82%	UNGGUL								
2	KARTA	9									1		1	1		1																																		1					7	77,78%	TIDAKUNGGUL							
3	LPM	11																																																			1									5	45,45%	TIDAKUNGGUL
1	RW 01	4																																																			1	1	4	100,00%	UNGGUL							
2	RW 02	6																																																				1	1	4	66,67%	TIDAKUNGGUL						
3	RW 03	4																																																						1	1	4	100,00%	UNGGUL				
4	RW 04	4							1																																														1	1	4	100,00%	UNGGUL					
5	RW 05	4																																																						1	1	4	100,00%	UNGGUL				
6	RW 06	4																																																						1	1	4	100,00%	UNGGUL				
7	RW 07	4																																																						1	1	4	100,00%	UNGGUL				
8	RW 08	5																																																						1	1	4	80,00%	UNGGUL				



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

No	Uraian	Keterangan	Kriteria	Eviden/Bukti Dukung	
1	Kelurahan Cipamokolan	Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	Terdapat 7 RW yaitu RW 01, RW 03, RW 05, RW 07, RW 08, RW 10, dan RW 12 yang sudah dilaksanakan guna terpeliharanya sarana prasarana jalan di wilayah Kelurahan Cipamokolan		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

				 	 
--	--	--	--	--	--



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

					
		Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air	Terdapat 6 RW yaitu RW 01, RW 02, RW 04, RW 05, RW 06, dan RW 08 yang sudah dilaksanakan guna terpeliharannya saluran air di lingkungan RT/RW dalam pembangunan sarana prasarana Kelurahan Cipamokolan		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**
Kecamatan Rancasari

		<p>Perbaikan/pemeliharaan gedung / bale RW</p>	<p>Terdapat 3 RW yaitu RW 03, RW 09 dan RW 11 yang sudah dilaksanakan guna terpeliharanya Gedung RW dalam pembangunan sarana prasarana Kelurahan Cipamokolan</p>		
--	--	--	--	--	--



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

					
2	Kelurahan Manjahlega	Urban Farming	Buruan SAE di RW		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

					
		Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang	Pemasangan sumur resapan dan drumpori		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**





Kecamatan Rancasari

					
		Penanaman Pohon			



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

		Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	Pemeliharaan Jalan : 1. RW 05 2. RW 14 3. RW 02		
		Perbaikan/pemeliharaan gedung / bale RW	Pemeliharaan Gedung : 1. RW.07 2. RW.12 3. RW.16 4. RW.09 5. RW.01		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari





**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**






Kecamatan Rancasari

		Taman Tematik ramah disabilitas	Taman RW 01 dan RW 07		
		Bandung Tanginas	monitoring budidumber lele & toga kepada salah KPM Pemberdayaan Keluarga Tanginas di RW 10 manjahlega dan pembagian sembako bandung tanginas swadaya RW 09		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

					
		Kelompok Lansia Sehat	Lansia sehat RW 04		
		Fasilitasi posyandu lingkup RW	memfasilitasi BIAN Kelurahan Manjahlega		



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

		<p>Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan Rutin PKK dan simulasi penanganan bencana oleh Diskar PB UPT Bandung timur 2. Pertemuan Rutin TP PKK Kelurahan Manjalega&sosialisasi PAAREDI (Pola Asuh Anak&Remaja di Era Digital) 	 	 
		<p>Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga</p>	<p>sosialisasi praktek pengolahan sampah berbasis eco enzyme sebagai upaya pembentukan karakter peduli kesehatan lingkungan</p>		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

		Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK	Sosialisasi UMKM dan MCC (Manjahlega Crafter Community)		
		Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah	Kang Pisman RW 04		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**

Kecamatan Rancasari

		RW siaga	Lembur Tohaga Lodaya RW 16 dan sosialisasi siap siaga bencana		
		Pembinaan Posyandu	Kegiatan Posyandu di RW		



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

		<p>Ada encana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Launching serah terima PMT stunting 2. kegiatan bazar ikan dan produk olahan ikan serta produk umkm lainnya dihadiri oleh ka.Dis Perikanan dan Kelautan Prov.Jabar,Ketua DPRD Kota Bdg,kolaborasi antara LPM,Forum Rw Kel.Manjahlega dgn DKPP Jabar untuk membangkitkan kembali perekonomian melalui umkm 3. Bakti Sosial Karang Taruna 	  	  
--	--	--	--	--	--



1. EGIATAN BANDUNG TANGINAS



2. PENGUATAN KELEMBAGAAN





3. KEGIATAN KELOMPOK LANSIA SEHAT



4. FASILITASI POSYANDU LINGKUP RW





5. SOSIALIASI/PEMBINAAN BINA KELUARGA





DATA DESA KECAMATAN RANCASARI				
NO	KELURAHAN	NAMA DESA	STATUS DESA	WILAYAT
1	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010001
2	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010002
3	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010003
4	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010004
5	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010005
6	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010006
7	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010007
8	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010008
9	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010009
10	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010010
11	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010011
12	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010012
13	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010013
14	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010014
15	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010015
16	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010016
17	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010017
18	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010018
19	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010019
20	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010020
21	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010021
22	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010022
23	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010023
24	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010024
25	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010025
26	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010026
27	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010027
28	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010028
29	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010029
30	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010030
31	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010031
32	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010032
33	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010033
34	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010034
35	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010035
36	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010036
37	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010037
38	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010038
39	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010039
40	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010040
41	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010041
42	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010042
43	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010043
44	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010044
45	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010045
46	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010046
47	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010047
48	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010048
49	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010049
50	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Desa Arjasari 010050

6. SOSIALISASI KEWIRAUSAHAAN BAGI ANGGOTA UP2K PKK





7. PEMBINAAN POSYANDU





8. MELAKSANAKAN BBGRM/BBKT





**TAMAN TEMATIK RAMAH DISABILITAS
KECAMATAN RANCASARI**





EVIDEN PERSENTASE SISKAMLING RW AKTIF

DATA PENGURUS SISKAMLING RW AKTIF KELURAHAN
CIPAMOKOLAN KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG

NO	RW	PENGURUS SISKAMLING	
1.	01	Ketua RW Sekretaris Bendahara Ketua Keamanan Anggota	Cuncun Sudiarna Subagio Susantri Dinar Ato S Uju Juhara Aris Dermawan Robbi Yadi Mulyadi
2.	04	Ketua RW Sekretaris Bendahara Ketua Keamanan Anggota	H, Erwan Sa'ah Toni Gustiana H. Enay Sukandar Sumanto Dodo R. Asep Ramlan Herdi Wiguna Roni Ujang Yana Ade Irwan Dedi Supardi Wawan Nardi Permana Yuono Fathur Yayat
3.	05	Ketua RW Sekretaris Bendahara Ketua Keamanan Anggota	Saeful Azhar, ST. Asep Apandi Drs. Mursyd, Apt Dikdik Subarkah M. Hidayat Nana Sutarna Gunawan Kurniawanto Agus Supriyanto
4.	07	Ketua RW Sekretaris Bendahara Ketua Keamanan Anggota	H. Bambang Supriyanto, SE Bambang Sugiyanto Suyud Jalangkara M. Nurdin Komarudin Bono Mamat Edi S Wawan
5.	09	Ketua RW Sekretaris Bendahara Ketua Keamanan Anggota	Kurnia Yudhia Drs. Suhendra Choerunnisa Nur Ardyati Atang Adding Oki Angus Mithun Iwan Ayip Ucok Tia
6.	10	Ketua RW Sekretaris Bendahara Ketua Keamanan Anggota	H. Ade Sudarna H. Andi Potto Hairuddin Lily Apit Suharto Aris Ayi Suherman Maman Nandang



			Ujang Kumis Ujang G Ahmad Soni Uwo Sutisna Dedih Ari Tri Basuki
7.	11	Ketua RW Sekretaris Bendahara Ketua Keamanan Anggota	Deni Hadi Suparta, SE. Ika Arie Wicaksono, SE., MBA Siswandi, SE., MM Suwarna Subandi Agus Iman Rustandi Ajat S Andri Komar Dadi Aep Atep S Edi Herman Dani Ahmad Tasropik Dian Nurdin Gilang Iwan Karna Kuswandi Dudun Yayan S Anang Anton Tatang Anwar Asep Usep Bubun Edwin MiminJajang
8.	12	Ketua RW Sekretaris Bendahara Ketua Keamanan Anggota	H. Hariyanto Herry Herdiman Evi Soviawati Yadi Iman Yanto Pepeng Akhyat

TATA TERTIB**SISKAMLING PETUGAS SATUAN PENGAMANAN****RW 11 GSR KELURAHAN CIPAMOKOLAN**

1. MELAKSANAKAN APEL SIAGA SETIAP PERGANTIAN SHIFT.
2. AREA PENJAGAAN MELIPUTI :
 - a. PINTU GERBANG UTAMA;
 - b. PINTU MASUK BELAKANG;
 - c. POS AREA.
3. PELAKSANAAN PATROLI SETIAP SHIFT JAGA.
4. SHIFT JAGA MELIPUTI :
 - a. 08.00 – 17.00 (PAGI)
 - b. 17.00 – 23.00 (SORE)
 - c. 23.00 – 08.00 (MALAM)
5. KOORDINASI MENGGUNAKAN GRUP WHATSAPP KEAMANAN.
6. SETIAP KEJADIAN WAJIB DILAPORKAN KEPADA KOORDINATOR KEAMANAN / KOMANDAN REGU (DANRU) KEAMANAN VIA GRUP WHATSAPP.



Foto Kegiatan Siskamling Aktif







DATA CAPAIAN SISKAMLING RW AKTIF KECAMATAN RANCASARI TAHUN 2022

NO	KELURAHAN	Jumlah RW yang mempunyai siskamling aktif (75%)	KRITERIA YANG TERPENUHI	evidence/foto kegiatan
1	CIPAMOKOLAN (12 RW)	RW.01	Adanya Kelompok Siskamling, Adanya Jadwal Siskamling, Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling	
		RW. 02		
		RW. 03		
		RW. 04	Adanya Kelompok Siskamling, Adanya Jadwal Siskamling, Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling	
		RW. 05		
		RW. 06		
		RW. 07	Adanya Kelompok Siskamling, Adanya Jadwal Siskamling, Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling	
		RW. 08		
		RW. 09	Adanya Kelompok Siskamling, Adanya Jadwal Siskamling, Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling	
		RW. 10		
		RW. 11		
		RW. 12		







KRITERIA YANG TERPENUHI	KETERANGAN	Evidence/Foto Kegiatan
1	Terdapatnya Siskamling Aktif di 13 RW dan 86 RT di Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari dengan terdapatnya Laporan Susunan Pengurus, Kelompok siskamling, Adanya jadwal siskamling, Buku Jaga Kegiatan Siskamling dan Terdapatnya laporan kejadian	
2	Jumlah kegiatan pembinaan linmas kecamatan	
3	Terdapatnya 73 Anggota Linmas RT dan RW Kelurahan Derwati yang telah mengikuti pelaksanaan Pembinaan Siskamling RW pada Tahun 2022	



NO	Jumlah RW yang mempunyai siskamling aktif 7%)	KRITERIA YANG TERPENDEK	evidence/foto kegiatan
1		75% dari Jumlah RW Yang memiliki Kriteria Siskawling Aktif dari seluruh jumlah RW dikelurahan tersebut	
	RW 01	. Adanya SK Pengurus	
	RW 02	. Adanya Kelompok Siskamling	







RW 03	. Adanya Jadwal Siskamling	
RW 04	. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling	
RW 05		 



RW 06			
RW 07			
RW 08			
RW 09	JADWAL PIKET/R ONDA JADWAL ABSENSI BUKU LAPORA N KEJADIA N		



RW 10	
RW 11	
RW 12	
RW 13	



RW 14		 
RW 15		
RW 16		



EVIDEN PERSENTASE KELURAHAN UNGGUL

PERAYAAN HARI BESAR KEAGAMAAN
DI KECAMATAN RANCASARI

MAULID NABI MUHAMMAD SAW





HARI SANTRI NASIONAL



Urban Farming





Sosisialisasi Urban Farming





Sosialisasi ODF



**DOKUMENTASI KEGIATAN PENGECATAN KERB
WILAYAH KECAMATAN RANCASARI TAHUN 2021**





Penanaman Pohon





Biopori/Sumur Resapan





Pojok Baca

DOKUMENTASI POJOK BACA / TAMAN BACA
ADANYA KOLEKSI KORAN-KORAN DAN MAJALAH
KELURAHAN MANJAHLEGA KECAMATAN RANCASARI





KELURAHAN DERWATI KECAMATAN RANCASARI





KELURAHAN MEKARJAYA KECAMATAN RANCASARI





DOKUMENTASI KEGIATAN PENGECATAN KERB





Kecamatan Rancasari

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**
